



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**APBN  
KITA**  
KINERJA & FAKTA

---

**KALEIDOSKOP  
2022**

foto:  
Pexels - Tom Fisk

JANUARI 2023

Scan dan Unduh  
APBN KITA





“Kinerja APBN menggambarkan keseluruhan upaya Indonesia menghadapi pandemi yang luar biasa selama tiga tahun, memulihkan kondisi ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.”

**Menteri Keuangan,  
Sri Mulyani Indrawati**

## Daftar Isi

Kaleidoskop 2022	<b>6</b>
Ringkasan Eksekutif	<b>69</b>
Perkembangan Ekonomi Makro	<b>79</b>
Realisasi APBN 2022	<b>83</b>
Laporan Khusus	<b>90</b>
Penerimaan Pajak	<b>99</b>
Penerimaan Bea dan Cukai	<b>109</b>
Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>115</b>
Belanja Pemerintah Pusat	<b>123</b>
Transfer Daerah & Dana Desa	<b>133</b>
Pembiayaan Utang	<b>141</b>





# 22

**Diterbitkan oleh:**

Kemenkeu Republik Indonesia.  
Pelindung: Menteri Keuangan  
dan Wakil Menteri Keuangan.

**Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon

I Kemenkeu **Penanggung Jawab:**

Direktur Jenderal Pengelolaan  
Pembiayaan dan Risiko selaku  
Sekretaris Komite Asset-

*Liability Committee* Kementerian  
Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan  
Layanan Informasi, Direktur  
Strategi dan Portofolio

Pembiayaan, Kepala Pusat  
Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan**

**Redaksi:** Tim *Deputies Asset-  
Liability Committee* Kementerian  
Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim

Teknis *Asset-Liability Committee*  
Kementerian Keuangan, Tim  
Redaksi Penyusun Publikasi

APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor  
Penyusun Publikasi APBN KiTa

**Desain Grafis, Layout dan Foto:**

Biro KLI Kementerian Keuangan.

**Alamat Redaksi:** Gedung Frans  
Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin  
Raya No. 1, Jakarta.

Kaleidoskop  
2022

# KALEIDOSKOP 2022



# Direktorat Jenderal Anggaran

Sepanjang tahun 2022, beberapa peristiwa penting telah dirangkum melalui agenda kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat, *prudent*, fleksibel, dan responsif, diantaranya adalah :

## 1) Januari – Desember 2022

**Penyusunan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN dan Nota Keuangan (NK) RAPBN TA 2023, Penetapan Peraturan Presiden Tentang Rincian APBN TA 2023, serta Penyerahan DIPA Kementerian Negara/Lembaga (K/L) TA 2023**

Sesuai amanat Pasal 15 dalam Undang-Undang (UU) 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Pemerintah

Pusat mengajukan RUU tentang APBN disertai NK dan RAPBN dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Diawali dengan mengkoordinasikan penyusunan RUU dan NK RAPBN 2023 serta Himpunan RKAKL Tahun 2023 dengan melibatkan *stakeholder* internal maupun eksternal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui berbagai forum rapat teknis, rapat pimpinan, serta Sidang Kabinet Pembahasan RUU APBN beserta NK dan RAPBN Tahun anggaran 2023.

Pada tanggal 16 Agustus 2022 Presiden Republik Indonesia menyampaikan Pidato Kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR dalam rangka mengantarkan RUU APBN, NK dan RAPBN dan Himpunan RKAKL Tahun 2023. Selanjutnya



pada tanggal 23 Agustus 2022 disampaikan pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2023, yang kemudian disampaikan jawaban atas pandangan tersebut oleh Pemerintah dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Agustus 2022.

Pembahasan RUU APBN beserta NK dan RAPBN Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah, Gubernur Bank Indonesia (BI) dengan DPR dilakukan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR pada tanggal 30 Agustus 2022, yang kemudian dibahas oleh panitia kerja. Secara simultan komisi-komisi di DPR membahas Rencana Kerja Anggaran K/L bersama mitra kerjanya.

Selanjutnya, dilaksanakan Rapat Paripurna DPR untuk mengambil keputusan terhadap RUU APBN beserta NK dan RAPBN TA 2023 Hasil Pembahasan di Tingkat I menjadi UU APBN TA 2023. Tindak lanjut atas persetujuan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian APBN TA 2023.

Sebagai simbol kesiapan administrasi penganggaran dalam pelaksanaan APBN TA 2023, dilakukan penyerahan DIPA K/L Simbolis oleh Presiden di Istana Negara kepada 14 K/L yang: (a) memperoleh opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir (tahun 2019 – 2021), (b) merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023, serta (c) memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi. Selain itu juga diserahkan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah kepada para Gubernur dan Kepala Daerah serta penyampaian arahan Presiden atas Pelaksanaan APBN Tahun 2023. Sejalan dengan hal tersebut Kemenkeu juga mensosialisasikan APBN TA 2023 melalui berbagai media antara lain *Budget In Brief* (BIB), wawancara *live* dengan pimpinan Kemenkeu terkait kebijakan APBN TA 2023, dan Portal Data APBN.



2) 17 Mei – 27 Juni 2022

**Kebijakan Antisipatif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN (Kondisi Kedaruratan Sebagaimana pada Pasal 42 ayat (1) UU APBN 2022)**

Dalam rangka mempertahankan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik dalam negeri di tengah tantangan kenaikan harga komoditas energi dunia, Pemerintah perlu melakukan langkah responsif melalui percepatan pembayaran kompensasi BBM dan listrik. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemasok BBM dan listrik yang terdampak oleh kenaikan harga bahan baku komoditas energi, agar penyediaan energi domestik dapat terjangkau oleh masyarakat serta berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penebalan perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Pada tanggal 17 Mei 2022 diajukan dokumen kedaruratan “Kebijakan Antisipatif APBN- untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi,



Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN” kepada DPR melalui Surat Menteri keuangan Nomor S-411/MK.02/2022. Selanjutnya dilakukan Rapat Kerja Badan Anggaran DPR bersama dengan Pemerintah Pusat serta Persetujuan Tambahan Kebutuhan Anggaran dalam Merespon Kenaikan Harga Komoditas.

Atas hasil raker banggar tersebut ditetapkan Perpres Nomor 98/2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022 pada tanggal 27 Juni 2022 yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemburuan kondisi ekonomi makro dan keuangan, sehingga APBN perlu merespon secara cepat melalui tambahan kebutuhan belanja subsidi, kompensasi BBM, listrik dan disertai dengan penebalan perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

### 3) 30 Mei – 5 Juli 2022

#### **Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Semester II Laporan Pelaksanaan APBN 2022**

Sesuai amanat Pasal 27 dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester I APBN dan Prognosis Semester II. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR tanggal 4 Juli 2022, untuk selanjutnya dibahas bersama antara Pemerintah Pusat dan DPR.



### 4) 31 Mei 2022

#### **Pengumuman Indeks Transparansi Anggaran Indonesia**

*International Budget Partnership (IBP)* merilis *Open Budget Survey (OBS)* tahun 2021, dimana hal tersebut merupakan momen yang sangat dinantikan oleh 120 negara anggota di seluruh dunia. Dalam OBS tahun 2021, Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat menggembirakan. Dengan perolehan skor 70, Indonesia berhasil menjadi negara dengan peringkat tertinggi di ASEAN dalam hal transparansi anggaran (OBS 2019: peringkat kedua). Dalam konteks global, dengan perolehan nilai tersebut,

Indonesia berhasil menduduki peringkat 17 dari 120 negara anggota (OBS 2019: peringkat 18). Transparansi anggaran penting kaitannya dalam manajemen dan akuntabilitas fiskal, dimana membuka akses seluas-luasnya kepada warga negara tanpa terkecuali, untuk mengakses informasi tentang anggaran yang mereka butuhkan, mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan anggaran. Pemerintah juga dapat memiliki gambaran penuh dan akurat atas keuangan negara serta membantu memperkuat kredibilitas rencana fiskal serta mendukung kepercayaan/persepsi pasar atas kebijakan yang diambil. Hal tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 5) Sosialisasi APBN Kepada Generasi Muda



Tujuan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Menyapa adalah memberikan edukasi tentang APBN kepada para siswa/i S Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat antara lain informasi mengenai postur APBN, alokasi APBN untuk sektor pendidikan, serta manfaat APBN bagi masyarakat baik secara umum maupun spesifik bagi daerah sekolah yang dikunjungi. Selain itu, DJA Menyapa juga menyerap aspirasi dan harapan dari para siswa/i serta tenaga pengajar terhadap APBN ke depannya. DJA menyapa dilaksanakan pada lima jenjang SMA antara 3 Februari – 14 Desember 2022, yaitu SMAN 1 Sleman, SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Kediri, SMAN 1 Jombang, Madrasah Aliyah Negeri IC Kota Batam. Dengan dilaksanakannya kegiatan DJA Menyapa, diharapkan para siswa/i SMA/Sederajat memiliki pengetahuan serta menumbuhkan *sense of belonging* terhadap APBN.



**“Menyelamatkan nyawa dan perekonomian bukanlah dua hal yang terpisah. Pemerintah tidak ingin memilih pilihan yang tidak mungkin, karena dua-duanya penting bagi masyarakat”**

Kegiatan *Budget Goes To Campus* (BGTC) dalam masa pandemi di lakukan secara *daring* yang melibatkan narasumber dari aparat Pemerintahan dan juga Profesional dengan peserta dari lingkungan Pemerintahan dan juga Masyarakat. Tujuan dari BGTC adalah memberikan edukasi kepada para mahasiswa/i melalui pemaparan pelaksanaan kebijakan yang diambil Pemerintah yang akan mendapatkan masukan dan kritik dari para Profesional serta Akademisi yang bergerak di bidangnya. Pada kegiatan ini juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. BGTC pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak tiga event, dengan mengusung tema : (1) penanganan Covid-19 dan transformasi kesehatan pada 24 Februari 2022; (2) uji



publik RUU APBN 2023 pada 25 Juli 2022; serta (3) arah kebijakan APBN TA 2023 pada 15 Desember 2022. Dengan dilaksanakan kegiatan BGTC ini diharapkan para mahasiswa dapat mengetahui manfaat dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah serta kritik dari sudut pandang para akademisi dan Pemerintah juga mendapatkan masukan yang membangun dari para akademisi.

### **Olimpiade APBN Tahun 2022, Lomba Debat APBN Tahun 2022, Lomba Konten APBN, dan Lomba Mengajar APBN**

Diikuti oleh 4.674 peserta yang terdiri dari 112 peserta jenjang Sekolah Menengah Pertama, 4.177 tim peserta jenjang Sekolah Menengah Atas, 197 tim peserta jenjang Perguruan Tinggi, serta 188 peserta Pengajar. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi tentang APBN kepada para siswa/i Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA, mahasiswa, serta para Guru melalui kompetisi yang sehat.

Kegiatan Lomba Konten APBN merupakan sarana edukasi APBN bagi para siswa/i SMP melalui kompetisi pembuatan video pendek mengenai APBN yang kemudian diunggah pada platform Tiktok dan Youtube. Pemenang Lomba Konten APBN diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan para pemenang berhak mendapatkan dana pendidikan dari sponsor. Lomba Debat APBN merupakan lomba debat yang bertemakan APBN. Para pesertanya merupakan mahasiswa/i di Indonesia. Untuk mengikuti kegiatan ini, peserta diwajibkan mengirimkan esai dan akan diuji pengetahuannya akan esai tersebut untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Final pelaksanaan Lomba Debat APBN 2022 diadakan pada tanggal 26 Oktober 2022 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Kantor Pusat Kemenkeu.



Lomba Mengajar APBN adalah sarana untuk para guru SMA di seluruh Indonesia dalam memberikan materi terkait APBN. Para guru akan membuat video terkait APBN yang kemudian akan diunggah di Youtube. Pemenang Lomba Mengajar APBN diumumkan pada tanggal 10 November 2022 dan para pemenang berhak mendapatkan hadiah dari sponsor.

### 6) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penganggaran K/L

Bimbingan Teknis (Bimtek) Penganggaran merupakan salah satu tugas Direktorat Anggaran Bidang dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran Belanja Pemerintah Pusat pada K/L khususnya lingkup Satuan Kerja (satker). Tujuan pelaksanaan Bimtek Penganggaran antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman Satker terhadap proses penganggaran termasuk revisi

penganggaran;

2. Menyamakan persepsi dalam hal-hal terkait Penilaian Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; dan

3. Memberikan bimbingan terhadap penyelesaian permasalahan terkait penganggaran kepada K/L khususnya satker-satker di daerah.

Sepanjang tahun 2022, pelaksanaan Bimtek Penganggaran dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu wilayah barat Indonesia (di Kota Bandar Lampung) pada 19 Oktober 2022, Wilayah Tengah Indonesia (di Kota Semarang) pada 11 November 2022, dan Wilayah Timur Indonesia (di Kota Denpasar) pada 22 November 2022. Bimtek tersebut dilaksanakan secara *hybrid* (yaitu *Luring* dan *Daring*) yang dihadiri oleh Kepala Satker atau yang mewakili dari mitra K/L Direktorat Anggaran Bidang, perwakilan dari DJA, serta dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DPJb) selaku perwakilan DJPb.



## 7) DJA MENDENGAR

Kegiatan DJA Mendengar Tahun 2022 merupakan sinergi seluruh jajaran DJA dengan Mitra Kerja (K/L) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan DJA kepada mitra kerjanya. Kegiatan tersebut mengambil tema **“Sinergi untuk Belanja Negara yang Lebih Berkualitas”**. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* yang dihadiri oleh mitra kerja Direktorat Anggaran Bidang Ekontim, Anggaran Bidang PMK, dan Anggaran Bidang Polhukhankam BA BUN. Kegiatan tersebut bertujuan dilaksanakannya kegiatan DJA Mendengar adalah untuk memperoleh masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari K/L untuk

perbaikan peningkatan layanan DJA di masa yang akan datang.

## 8) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (ZI-WBK)

Pembangunan ZI-WBK dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada suatu unit kerja. Predikat WBK akan diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan menganugerahkan Penghargaan

Nagara Dana Abyakta atas predikat WBK kepada enam unit kerja di lingkup DJA yaitu, (1) Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (2) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, (3) Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, (4) Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, (5) Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan (6) Direktorat Sistem Penganggaran. Dengan capaian tersebut, seluruh unit kerja di DJA telah berpredikat WBK. Keberhasilan tersebut dapat tercapai karena setiap unit bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga integritas serta melakukan berbagai terobosan inovasi pelayanan.

Adapun setelah mendapatkan predikat WBK tersebut, diharapkan seluruh unit kerja tetap menjaga pelayanan dan integritas, memastikan tidak terdapat penurunan kualitas, dan menjaga unit dari berbagai penyimpangan. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan program WBK, akan dilakukan penilaian internal dan pelaporan perkembangan pembangunan ZI-WBK pada unit kerja yang telah mendapatkan predikat WBK setiap dua tahun sekali.

# Direktorat Jenderal Pajak:

## PPS Hingga Pajak Kripto

---

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merangkum beberapa peristiwa besar yang terjadi pada 2022, sebagai berikut:

### 1 Januari 2022

Kemenkeu melalui DJP membuka layanan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) secara *daring* di situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). PPS adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Program ini mulai berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

### 12 Januari 2022

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3/2022 tentang

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai. Ada empat dokumen yang dibebaskan dari pengenaan Bea Meterai, yaitu: (1) dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam; (2) dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan atau sosial nonkomersial.

Berikutnya: (3) dokumen yang diperlukan dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan; (4) dokumen yang terkait pelaksanaan



perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik.

### 1 Februari 2022

*Udemy Inc., Vonage Business Inc., Blizzard Entertainment Inc., dan Twitch Interactive Singapore Pvt., Ltd* wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terhitung mulai 1 Februari 2022. Keempat perusahaan tersebut merupakan penyedia layanan digital dari luar negeri yang kerap melakukan transaksi di Indonesia. *Udemy* menyediakan layanan kursus *daring*, *Vonage* menyediakan layanan komunikasi *cloud*, *Blizzard Entertainment* menyediakan layanan dan menjual permainan komputer, dan *Twitch Singapore* merupakan penyedia layanan video dan iklan.

### 2 Februari 2022

Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau FTZ) tidak perlu mengajukan permohonan secara terpisah dan menyerahkan berkas fisik sama sekali. Pengusaha di KPBPB cukup membuat dokumen Pemberitahuan

Perolehan atau Pemasukan barang atau jasa dan mengunggahnya ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW), kemudian sistem di DJP akan tersambung ke SINSW dan bekerja secara elektronik hingga hasil *endorsement* diberikan.

### 24 Februari 2022

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menetapkan 332 kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan sektor energi terbarukan sebagai tujuan investasi harta bersih dalam PPS.

### 3 Maret 2022

DJP memastikan data DJP termasuk data wajib pajak yang disimpan oleh DJP dalam kondisi aman dan dapat diakses sebagaimana biasanya. Hal ini disampaikan menanggapi sebuah utas di Twitter dari akun *Darktracer* yang isinya antara lain mengatakan, sebanyak lebih dari 49 ribu *credential user* bocor yang dipakai untuk masuk ke dalam situs web pemerintahan. DJP menyampaikan, kebocoran data (*leak*) diduga berasal dari perangkat pengguna (*user*) yang terinfeksi *malware*.



#### **4 Maret 2022**

Presiden Joko Widodo melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara daring melalui e-Filing di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kepala Negara mengajak para wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan.

#### **8 Maret 2022**

Delapan pejabat tinggi negara melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh) secara serentak di Aula Chakti Buddhi Bhakti (CBB), Kantor Pusat DJP.

Kedelapan pejabat negara tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto,

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diwakili Inspektur Jenderal TNI Bambang Suswanto, dan Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara.

#### **30 Maret 2022**

Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pemerintah memandang aset

kripto sebagai komoditas yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022.

### 19 April 2022

DJP kembali menyelenggarakan sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kepada para wajib pajak prominen di Makassar. Penyelenggaraan sosialisasi direlai melalui *Zoom Meeting* dan Youtube DJP.

### 1 Mei 2022

Pajak Kripto mulai diberlakukan.

### 19 Mei

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP, Kemenkeu di Gedung Mar'ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta.

### 30 Juni 2022

PPS usai pada pukul 24.00 WIB. Total jumlah peserta ada 247.918 Wajib Pajak, yang terbagi menjadi 82.456 surat

keterangan dari kebijakan I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II.

Jumlah PPh yang disetorkan sebesar Rp61,01 triliun, terdiri dari Rp32,91 triliun kebijakan I dan Rp28,1 triliun untuk kebijakan II.

Nilai harta bersih yang diungkapkan sebesar Rp594,82 triliun. Terdiri dari nilai harta bersih dari deklarasi dalam negeri sebesar Rp498,88 triliun, nilai harta bersih dari repatriasi sebesar Rp13,70 triliun, nilai harta bersih dari deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 triliun, dan nilai harta bersih dengan komitmen investasi sebesar Rp22,34 triliun.

### 6 Juli 2022

Kemenkeu mengumumkan, sampai dengan 30 Juni 2022, pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1 triliun dari pengenaan PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia di dalam Indonesia melalui PMSE. Jumlah tersebut berasal dari 97 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran ke kas negara. Untuk tahun 2022 sendiri, total setoran sudah sebesar Rp2,5 triliun.



### 19 Juli 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan peluncuran inovasi NIK menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Jakarta. Bersama Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Menteri Keuangan mendemokan *login* ke aplikasi di situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menggunakan NIK. Dengan perubahan besar ini, masyarakat diberikan kemudahan pada saat mendapatkan NPWP dengan tidak perlu repot-repot mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Masyarakat menggunakan NIK untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

### 25 Agustus 2022

DJP bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi lanjutan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja klaster perpajakan di Surabaya. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pembuka dari rangkaian sosialisasi lanjutan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yang dilakukan oleh Kemenkeu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas uji formal UU Cipta Kerja.

### 28 September 2022

DJP meluncurkan aplikasi e-SPT PPN 1107 PUT versi tahun 2022 untuk membuat SPT masa PPN 1107 PUT.



Semua pemungut PPN selain instansi pemerintah yang baru ditunjuk dan pemungut PPN pihak lain wajib menggunakan aplikasi e-SPT baru tersebut untuk masa pajak Oktober 2022.

Pihak lain dimaksud adalah pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), seperti penyelenggara transaksi kripto dan perusahaan asuransi dan reasuransi.

Peluncuran aplikasi tersebut merupakan konsekuensi terbitnya peraturan Direktur Jenderal Pajak pada 14 September 2022 yang mengakomodasi bentuk, isi,

serta tata cara pengisian dan penyampaian SPT PPN bagi pihak lain.

### **19 Oktober 2022**

Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka AK alias VA alias H beserta barang bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka beserta barang bukti tersebut diterima dan diteliti langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Proses Tahap 2 ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada 12 Oktober 2022. Tersangka AK alias VA alias H diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa dengan sengaja



menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT. EIB dalam kurun waktu Tahun Pajak 2020 s.d 2021 sehingga disangkakan melanggar Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) huruf d jo. Pasal 43 ayat (1) UU KUP dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun. Kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat perbuatan tersebut adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp56.128.206.269,00.

### **1 November 2022**

Untuk pertama kalinya, DJP menyelenggarakan festival beasiswa terbesar di DJP bertajuk *Aspire to Inspire Before We Expire*. Kegiatan ini dimaksudkan menjadi media bagi pegawai yang telah melaksanakan tugas belajar untuk berkontribusi pada institusi melalui penyampaian aspirasi dan gagasan di bidang kebijakan, kepatuhan pajak, dan teknologi

informasi untuk masa depan DJP.

### **7 Desember 2022**

Setelah dihelat dalam level nasional pada tahun 2018 dan 2020, tahun ini untuk pertama kalinya, DJP menggelar *Call for Paper* dan *Tax Conference* dalam satu rangkaian *International Tax Conference 2022* tingkat internasional. Puncak peringatan rangkaian *International Tax Conference 2022* tersebut resmi dilaksanakan di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP.

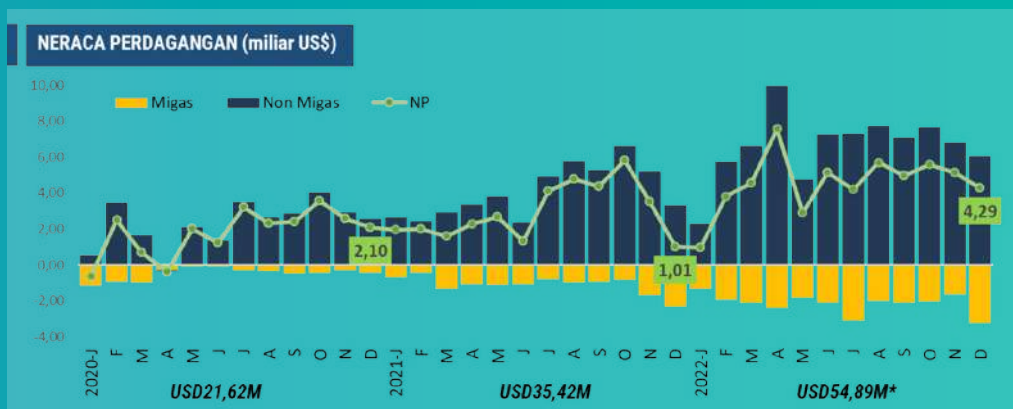
### **12 Desember**

Presiden Joko Widodo menetapkan PP Nomor 50/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Aturan ini merupakan aturan turunan UU HPP klaster KUP.

# Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tidak terasa tahun berganti, banyak tantangan menanti membutuhkan berbagai upaya untuk kita makin tangguh menghadapi. Di tahun 2022, kondisi perekonomian Indonesia makin pulih setelah sempat dihantam

badai pandemi. Kinerja APBN makin optimis di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik. Bea Cukai makin meneguhkan perannya dalam mengoptimalkan penerimaan negara, menjaga iklim investasi dan persaingan



(\*) Realisasi bulan Desember 2022 menggunakan data DJBC belum direkonsiliasikan dengan BPS

Pulihnya ekonomi Indonesia dibuktikan dengan performa ekspor yang makin tumbuh dari tahun ke tahun melanjutkan tren surplus neraca perdagangan Indonesia. Pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai makin optimal sepanjang tahun 2022.

Sebagai upaya untuk makin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian berbagai fasilitas yang tepat

asaran. Nah, kita sudah berbicara mengenai berbagai kemudahan melalui fasilitas, tapi Bea Cukai juga punya kemudahan dari segi Sistem Informasi. Beberapa fasilitas yang diberikan adalah dalam rangka mendukung ekspor dengan memberikan kemudahan impor untuk barang barang industri kecil menengah (KITE IKM) dan Klinik Ekspor untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Dampak dari fasilitas yang diberikan tercermin dari kinerja ekspor yang menggembirakan. Ekspor dari perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE IKM terus mengalami

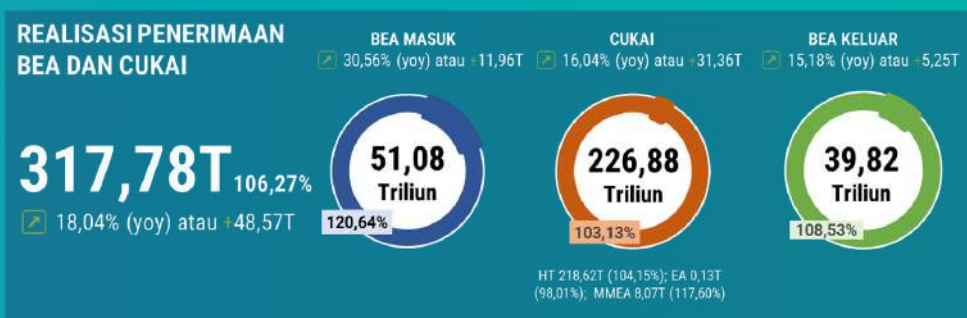
peningkatan, bahkan tumbuh diatas 40 persen (yoy) untuk tahun ini. Sedangkan dari 3.616 UMKM yang telah dibina, 618 UMKM binaan telah melakukan



(528 UMKM ekspor mandiri, 90 UMKM ekspor melalui pihak ketiga). Hasil olahan makanan menjadi sektor usaha yang paling banyak yakni mencapai 963 UMKM. Selain itu, untuk menjawab tantangan kemajuan perdagangan internasional, Bea Cukai mengembangkan Ceisa 4.0 sebagai bentuk komitmen penyempurnaan sistem dan prosedur layanan yang makin efektif dan efisien. Mewujudkan ekosistem logistik yang selaras, dibangun kolaborasi antar kementerian-lembaga, serta entitas bisnis terkait, melalui program *National Logistics Ecosystem* demi makin menurunnya biaya logistik dan makin tumbuhnya sektor industri

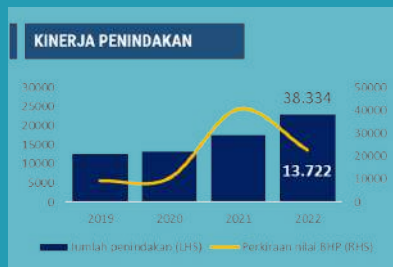
Menjawab tantangan perkembangan zaman, komitmen upaya perbaikan terus menerus dilakukan melalui Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan yang telah menunjukkan capaian yang makin positif dari ke empat pilar inisiatif strategis selama satu tahun berjalan

Performa ekonomi Indonesia makin meyakinkan terlihat juga pada capaian positif berbagai komponen penerimaan kepabeanan dan cukai. Berbagai program telah dilakukan sebagai wujud implementasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan fokus



Sebagai garda terdepan, melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya terus dilakukan dengan makin meningkatkan upaya pengawasan serta berbagai operasi terpadu dan terkoordinasi. Kerja sama pengawasan dengan Aparat

Penegak Hukum (APH) dan K/L terkait terus dilakukan mulai dari pertukaran data hingga operasi bersama. Sebagai hasilnya, kinerja penindakan juga selalu mengalami peningkatan, dengan komoditas terbesar berupa hasil tembakau.



Tidak hanya itu, dalam rangka mendukung terselenggaranya berbagai event internasional sebagai bagian mengenalkan wajah baik Indonesia yang makin mendunia. Bea Cukai berperan aktif memberikan fasilitas dan kemudahan prosedur dalam event Moto GP, WSBK, MX GP, Formula E, dan Penyelenggaraan G20. Bea Cukai juga meraih berbagai capaian yang makin menunjukkan eksistensi dalam lingkup kerja sama internasional demi mewujudkan visi, menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia.

Komitmen pemberantasan korupsi juga makin dibuktikan melalui pembangunan ZI-WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan kantor yang sudah memperoleh predikat WBK sebanyak 137 kantor dan WBBM sebanyak 32 kantor.

Tidak hanya berkuat pada tugas dan fungsi utama, Bea Cukai juga kerap terlibat dalam berbagai misi kemanusiaan sebagai bagian untuk makin dekat dan hadir di tengah masyarakat. Seluruh capaian ini merupakan hasil dari penyatuan peran Bea Cukai bersama masyarakat dari seluruh penjuru negeri.

Semoga di tahun 2023 nanti akan didapatkan kabar perekonomian Indonesia yang semakin optimis dan *resilient* menghadapi berbagai tantangan ke depan serta Bea Cukai semakin baik.

# Direktorat Jenderal Perbendaharaan

---

DJPb merangkum beberapa peristiwa besar yang terjadi pada 2022, sebagai berikut:

## **19 Januari 2022**

Dalam penyerahan Penghargaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi program KUR yang dikoordinir oleh Kemenko Bidang Perekonomian, antara lain melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), keterlibatan kantor vertikal DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KUR, serta pendampingan Pemda. KUR telah menjadi bagian penting dari Kredit/

Pembiayaan kepada UMKM dengan rasio 24,85 persen dari total kredit UMKM tahun 2021.

## **27 Januari 2022**

Menteri Keuangan secara resmi meluncurkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah sebuah sistem informasi yang memodernisasi pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara di sisi pengguna anggaran. SAKTI mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan SAKTI, berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahap penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban, mulai tingkat satker hingga K/L, dilaksanakan dalam satu



#### **14 Maret 2022**

Kemenkeu melalui DJPb dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan penandatanganan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/*Subsidiary Loan Agreement* (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan *Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project*. Nilai pinjaman untuk proyek ini sebesar USD610 juta (Rp8,7 triliun) yang berasal dari Bank Dunia dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Selain bertujuan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek, PLTA *Pumped Storage* dengan kapasitas 1040 megawatt ini turut mendukung transisi energi dan penurunan emisi karbon di Indonesia melalui Energi Baru

Terbarukan (EBT). Proyek ini dapat menyediakan air bersih, membuka lapangan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus kemudahan dalam pemenuhan daya listrik bagi UMKM.

#### **15 Maret 2022**

Dalam kegiatan penandatanganan Kontrak Kinerja Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Dirjen Perbendaharaan mengingatkan bahwa sektor perumahan memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional, baik dari sektor sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk sektor ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja.

Pemerintah memberikan fasilitas dukungan penyediaan perumahan bagi masyarakat, misalnya lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan salah satu jenis KPR bersubsidi. Pada akhir tahun 2021, pengelolaan dana FLPP resmi dialihkan dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera. Dengan demikian maka selanjutnya pengelolaan dana FLPP berada pada BP Tapera.

### 30 Maret 2022

Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 (*Unaudited*) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). *Entry meeting* merupakan bentuk komunikasi pemeriksaan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa, serta mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

### 30 Maret 2022

Rapat Koordinasi BLU menandai 16 tahun keberadaan BLU yang telah menunjukkan pertumbuhan dan dinamika yang sangat positif dalam berbagai aspek. BLU sebagai instansi pemerintah yang diberi fleksibilitas pengelolaan keuangan untuk peningkatan layanan, berperan penting sebagai *enabler* dan katalisator dalam penuntasan penanganan pandemi sekaligus pemulihan ekonomi serta reformasi struktural untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

### 31 Maret 2022

Dilakukan *soft launching* Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) *Mobile* serta Penyerahan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) SIKP KUR dan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG).



### **13 April 2022**

Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada K/L berkinerja pelaksanaan anggaran terbaik tahun 2021 sebagai apresiasi atas pengelolaan APBN yang telah dilakukan secara baik, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.

### **24 Mei 2022**

Proses pemeriksaan LKPP Tahun 2021 memasuki tahap akhir dengan diselenggarakannya *Exit Meeting* Pemeriksaan BPK serta Penyampaian Rencana Aksi dan Tanggapan Pemerintah.

### **14 Juni 2022**

LKPP Tahun 2021 kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Artinya, pemerintah dapat mempertahankan capaian opini

audit terbaik atas laporan keuangan tersebut selama enam tahun berturut-turut. Hal ini menjadi wujud dari komitmen dalam mengelola keuangan negara secara *prudent*.

### **30 Juni 2022**

Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2021 di DPR RI. Sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan dalam bentuk LKPP yang telah diperiksa oleh BPK (*Audited*). RUU ini diajukan untuk dibahas dan dimintakan persetujuan agar ditetapkan menjadi UU.



### 6 Agustus 2022

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait Pemberdayaan UMKM dengan *President of Korea SMEs and Startups Agency* (KOSME). Kerja sama antara yang dituangkan pada MoU tersebut di antaranya berbagi pengetahuan mengenai dukungan sistem, pengetahuan, dan keahlian; *business matching* serta pameran dan promosi pasar UMKM; serta riset bersama mengenai pemberdayaan UMKM bagi kedua negara.

### 23 Agustus 2022

Wakil Menteri Keuangan didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan menerima delegasi dari *Korea Fiscal Information System* (KFIS)

dan *Korea Development Institute* (KDI). Kedua instansi pemerintah Korea Selatan ini merupakan bagian dari *The Ministry of Economic and Finance* (MOEF) yang menyampaikan laporan final kegiatan *Knowledge Sharing Program* terhadap proyek "*Initial Research towards Enhancing Indonesia's IFMIS (Next Generation SPAN)*".

### 6 September 2022

DPR mengesahkan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021 menjadi UU.

### 22 September 2022

Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyerahkan penghargaan kepada pimpinan K/L dan Pemda yang telah berhasil meraih opini WTP



minimal 5, 10, dan 15 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dalam rangkaian acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.

### **20 Oktober 2022**

10 Bank BPD menandatangani *General Master Repo Agreement* (GMRA) bersama dengan Direktur Pengelolaan Kas Negara. Transaksi *reverse repo* pemerintah adalah transaksi beli dengan janji untuk membeli kembali Surat Berharga Negara (SBN) pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, dalam hal ini pemerintah dan bank umum yang telah menjadi mitra (*counterpart*). Transaksi *reverse repo* pemerintah adalah upaya untuk menurunkan *cost of fund* melalui optimalisasi kas pada instrumen yang aman.

Reverse repo pemerintah juga diharapkan dapat memperdalam pasar sekunder SBN domestik.

### **25 Oktober 2022**

Untuk mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas pengelolaan Penerimaan Negara, diselenggarakan *Collecting Agent Performance Awards*. Penilaian kinerja dilakukan terhadap 93 *collecting agents* (bank dan lembaga persepsi lainnya) berdasarkan kontribusi nominal penerimaan negara, jumlah transaksi, dan kinerja operasional. Kinerja penerimaan negara tidak hanya diukur dari *tax ratio*, tetapi juga dari sisi ketepatan waktu dan jumlah diterima oleh negara.



### 1 November 2022

Menteri Keuangan melantik Astera Primanto Bhakti, sebelumnya Dirjen Perimbangan Keuangan, menjadi Dirjen Perbendaharaan menggantikan Hadiyanto yang memasuki masa pensiun.

### 6 Desember 2022

HAI-DJPb sebagai satu-satunya peserta *contact center* dari lembaga pemerintahan Indonesia memperoleh *Gold Medal* untuk Kategori Individual - *Best Contact Center Executive Director/Leader* tingkat Dunia dalam ajang *Top Ranking Performers Awards* (TRPA). TRPA merupakan kompetisi *contact center* tingkat internasional yang diselenggarakan oleh *Contact Center World* (CCW).

### 6 Desember 2022

Inovasi DJPb yaitu Platform Integrasi Belanja Pemerintah melalui Digipay sebagai wakil dari Kemenkeu memperoleh apresiasi sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) Tahun 2022. Digipay menyediakan kemudahan dalam transaksi belanja pemerintah secara lebih aman, praktis, dan efisien. Selain itu, Digipay memberikan ruang dan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang melalui dunia digital.

### 13 Desember 2022

Dalam rangkaian kegiatan *Stakeholders Collaboration*, ditandatangani MoU Pemberdayaan UMKM dalam program UMKM *Financing Empowerment* (U-FinE) dengan BNI, BRI, BSI, dan Bank Mandiri, juga *Government Investment Charter Subsidiary Loan Agreement* BUMN *Outstanding, Government Investment Charter Subsidiary Loan Agreement* BUMN Holding, Perjanjian Kerja Sama dengan PT Taspen dan PT Asabri, serta *Government Investment Charter* dengan Operator Investasi Pemerintah (OIP).

### 29 Desember 2022

Menteri Keuangan melakukan *video conference* dengan sejumlah pimpinan kantor vertikal Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan mengapresiasi capaian tahun 2022 seperti menangani Covid-19, membantu mendorong perekonomian daerah untuk tumbuh, menjaga kesehatan APBN, mendukung reformasi di bidang legislasi lewat pengesahan UU HPP, UU HKPD, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), sampai UU Ibu Kota Negara (IKN), menyelenggarakan kegiatan G20, menjaga LKPP tetap mendapatkan opini WTP, dan menghasilkan defisit mencapai angka di bawah 3 persen.

# Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

---

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merangkum beberapa peristiwa besar yang terjadi pada tahun 2022, sebagai berikut:

## **Januari 2022 : Key Performance Indicator (KPI) Tingkatkan Akuntabilitas Penyertaan Modal Negara (PMN)**

Pemerintah memberikan PMN kepada 7 (tujuh) BUMN sebesar Rp38.479 miliar di tahun 2022. PMN tahun 2022 akan difokuskan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta mendukung penjaminan proyek infrastruktur nasional.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN, PMN harus dikelola secara *good governance* dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sejak tahun 2021, Kemenkeu mewajibkan adanya *Key Performance Indicators* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama khusus bagi para penerima PMN.

KPI ini dituangkan pada Kontrak Kinerja antara BUMN/Lembaga penerima PMN dengan Kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk komitmen dari manajemen BUMN untuk mencapai target serta bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana APBN. Hingga bulan Januari 2022, seluruh BUMN/lembaga telah menandatangani KPI

PMN 2021 antara lain: PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT PLN, PT Penataran Angkatan Laut (PAL), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Indonesia *Tourism Development Corporation* (ITDC), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

### **Februari 2022: DJKN Canangkan Gebyar Lelang Produk UMKM dan KEDAI Lelang UMKM Tahun 2022**

Salah satu agenda prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Program pemberdayaan UMKM menjadi bagian mendukung agenda ini. DJKN, Kemenkeu turut mengambil peran untuk mendorong UMKM meluaskan potensi pasarnya dengan memanfaatkan lelang.

Momentum 114 tahun Lelang Indonesia di tahun ini, pada 19 Februari 2022, DJKN kembali memberikan tempat bagi UMKM untuk menguatkan eksistensinya dalam pasar melalui event Gebyar Lelang Produk UMKM 2022. Event yang rencananya akan digelar pada tanggal 24 Maret 2022 ini, ditargetkan dapat diikuti setidaknya oleh 600 pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, yang merupakan

binaan berbagai mitra seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BI, PIP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan lainnya. Sedangkan jumlah produk yang akan dilelang diperkirakan sebanyak 2.000 item.

Selain itu, Dalam rangka menjaga kesinambungan lelang produk UMKM, DJKN juga kembali mencanangkan Kompetisi dan Inovasi Lelang Sukarela Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM). Kompetisi ini mengusung semangat sosial guna membantu penguatan ekonomi nasional melalui kerja sama dengan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya.

Beberapa fleksibilitas diberikan kepada pelaku UMKM dalam Gebyar Lelang UMKM. Pengembangan digitalisasi layanan lelang melalui portal Lelang Indonesia [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dan kebijakan lain diharapkan makin memudahkan jual beli produk UMKM melalui lelang. Beberapa kemudahan tersebut, antara lain: adanya *extended* auction di mana pelaksanaan lelang lebih fleksibel. Selain itu, calon peserta lelang tidak perlu menyetor uang jaminan, dan adanya fitur atau menu khusus UMKM yang menjadi etalase produk-produk UMKM yang akan dilelang di platform [lelang.go.id](http://lelang.go.id).

### **Maret 2022: Peringatan 114 Tahun Lelang Indonesia dan Peluncuran KOIN 2022/2023.**

DJKN Kemenkeu menggelar lelang produk UMKM yang dilakukan secara serentak oleh unit vertikal DJKN yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Acara bertajuk Gebyar Lelang UMKM 2022 yang dirangkaikan dengan Pencanangan KEDAI Lelang UMKM 2022 ini digelar pada 24 Maret 2022 secara *hybrid* dan merupakan puncak rangkaian acara dalam momentum 114 Tahun Lelang Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menyebutkan, bahwa portal [lelang.go.id](http://lelang.go.id) adalah salah satu manifestasi visi dan misi DJKN. Portal tersebut adalah sebuah layanan *one stop service* berbasis teknologi informasi. Portal [lelang.go.id](http://lelang.go.id) sudah sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia; yaitu mendorong produktivitas, mendukung ekonomi, keuangan inklusif dan meningkatkan akses, serta mengoptimalkan jangkauan pemasaran produk UMKM melalui pemanfaatan teknologi.

Pada 31 Maret 2022, DJKN juga kembali meluncurkan Kompetisi Inovasi Manajer Aset, atau disingkat KOIN MAS. Kompetisi ini diikuti oleh 17 tim mewakili

17 Kantor Wilayah DJKN, sebagai ajang pembuktian implementatif atas peran DJKN selaku Manajer Aset. Progres dan hasil tim KOIN memberikan contoh bagaimana strategi mengelola aset negara secara optimal dan diharapkan dapat menjadi *best-practices* dalam mengelola aset negara yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset manapun.

### **April 2022: Pemerintah Kembali Luncurkan Program Keringanan Utang di Tahun 2022**

Pemerintah melalui DJKN Kemenkeu kembali meluncurkan program Keringanan Utang untuk debitur kecil di tahun 2022. Program Keringanan Utang tahun 2022 dimulai sejak diundangkannya PMK Nomor 11/PMK.06/2022 tanggal 22 Februari 2022, dengan tujuan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Debitur kecil dalam kategori program keringanan utang dimaksud adalah debitur dengan kriteria: (a) debitur yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar, (b) debitur penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit



paling banyak Rp100 juta, dan (c) debitur dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar. Adapun debitur dengan kriteria dimaksud dapat mengajukan keringanan utang apabila kepengurusan piutangnya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2021.

Adapun untuk seluruh debitur tersebut akan mendapat keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya. Sedangkan terhadap utang pokok, keringanan utang yang didapat oleh para debitur beragam sesuai dengan ketersediaan barang jaminan dan waktu pelunasan. Debitur yang memiliki barang jaminan berupa tanah/bangunan mendapatkan keringanan sebesar 35 persen dari sisa

utang pokok, sedangkan debitur yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan mendapatkan keringanan utang sebesar 60 persen.

Selain keringanan utang di atas, debitur juga akan mendapat tambahan keringanan utang sebesar 40 persen dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan, apabila melakukan pelunasan sampai dengan bulan Juni 2022, sebesar 30 persen apabila melakukan pelunasan pada bulan Juli – September 2022, atau sebesar 20 persen apabila melakukan pelunasan pada bulan Oktober – 20 Desember 2022. Khusus piutang pasien rumah sakit, biaya perkuliahan/sekolah, dan piutang hingga Rp8 juta, yang tidak didukung dengan barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan, di sepanjang tahun 2022 akan

diberikan keringanan utang sebesar 80 persen dari sisa kewajiban.

### **Juni 2022: Bea Lelang 0 Persen untuk Lelang Produk UMKM dan Benda Sitaan**

Kemenkeu menetapkan pengenaan tarif PNPB berupa Bea Lelang sampai dengan 0 persen (nol persen) melalui PMK Nomor 95/PMK.06/2022.

Pengenaan tarif Bea Lelang sampai dengan 0 persen ini dimaksudkan guna memberikan dorongan pengembangan lelang sebagai instrumen jual beli, salah satu bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dukungan untuk pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi. Selain itu, kebijakan ini juga disusun untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terkait penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana.

PNPB berupa bea lelang sampai dengan 0 persen ini berlaku untuk penyelenggaraan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di lingkungan DJKN Kementerian Keuangan dan Pejabat Lelang Kelas II, yang meliputi Bea Lelang Penjual dan Bea Lelang Pembeli.

Pengenaan tarif Bea Lelang dimaksud hanya berlaku untuk Lelang Produk UMKM, Lelang Terjadwal Khusus, dan Lelang Eksekusi Benda Sitaan dalam tindak pidana yang perkaranya belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

### **Agustus 2022: Batasi Ruang Gerak Debitur, Pemerintah Terbitkan PP 28 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN**

Pemerintah melalui PUPN terus melakukan upaya pengembalian hak negara berupa piutang instansi Pemerintah. Terdata hingga September 2022, jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) aktif yang diurus oleh PUPN sebanyak 45.524 berkas dengan total nilai outstanding sebesar Rp170,23 triliun.

Dalam rangka mempercepat/mengakselerasi pengurusan piutang negara tersebut, pada 31 Agustus 2022, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN. PP 28 Tahun 2022 hadir untuk memperkuat tugas dan wewenang PUPN dalam pengurusan piutang negara.



### November 2022: DJKN Gelar Anugerah Reksa Bandha

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L dan *stakeholders* di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan lelang, di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, pada 23 November 2022. Anugerah Reksa Bandha merupakan perubahan dan penggabungan dari kegiatan *BMN Award* dan *Lelang Award* yang pernah digelar pada tahun-tahun sebelumnya. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha tahun ini terdiri dari 5 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BMN dan 4 kategori di bidang lelang.

Penghargaan di bidang pengelolaan aset yang diberikan setiap tahun ini diberikan kepada K/L yang

memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN, dengan persyaratan memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Kategori apresiasi kepada K/L ini terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah satker. Kelompok I adalah K/L yang mempunyai 1-10 satker, kelompok II adalah K/L yang mempunyai 10-100 satker, dan kelompok III adalah K/L yang mempunyai lebih dari 100 satker.

Sementara itu, penghargaan di bidang lelang merupakan bentuk apresiasi kepada para insan lelang Indonesia, yang telah berkontribusi dalam penerimaan negara dari sektor lelang. Selain itu, apresiasi ini juga diberikan pada insan lelang Indonesia yang telah memasyarakatkan lelang kepada masyarakat termasuk kepada UMKM dan penghargaan kepada *stakeholders* dari sektor perbankan maupun nonperbankan yang telah berperan penting dalam perekonomian negara.

# Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

---

Tahun 2022, tahun dimana kita sudah bekerja keras bersama untuk terus mengawal pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, melakukan edukasi secara terus-menerus, selalu menjaga sinergi, dan menciptakan inovasi-inovasi demi pelayanan yang lebih baik lagi ke depan. Tahun tersebut, merupakan awal untuk menuju arah baru Hubungan Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana telah terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

## **Lembaran Baru Penguatan Desentralisasi Fiskal**

UU HKPD telah disusun dengan memperhitungkan detail substansi yang sangat cermat. Pengaturan mengenai transfer ke daerah, pengelolaan

pajak daerah, pengendalian APBD dan juga harmonisasi belanja pusat dan daerah, bertujuan agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Berbagai aspirasi dan masukan telah dibahas, dipertimbangkan dan diakomodasi dalam pasal-pasal penting UU HKPD.

Perbaikan kebijakan dalam UU HKPD dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) belum berperan secara signifikan dalam mendorong penurunan ketimpangan penyediaan layanan di daerah meskipun ketimpangan kemampuan keuangan daerah menurun. Oleh karena itu, UU HKPD didesain sebagai upaya reformasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fiscal *resource allocation* seperti



pemberian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Transfer ke Daerah, dan Pembiayaan, melainkan juga memperkuat sisi Belanja Daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan negara.

Keseluruhan pengaturan dalam UU HKPD melalui TKD berbasis kinerja dan didorongnya *creative financing* serta sinergi pendanaan tidak lain untuk mendukung daerah sebagai garda terdepan dalam upaya penyediaan layanan publik dan kesejahteraan, yang tentunya membawa manfaat bagi masyarakat. Selain itu pengaturan penguatan perpajakan daerah diharapkan dapat mendukung kemandirian daerah dengan tetap menjaga akses layanan publik dan iklim perekonomian daerah. Dengan adanya pengaturan belanja daerah maka APBD yang efisien, efektif, fokus, akuntabel, dan sinergis akan dapat terlaksana. Melalui pilar terakhir, UU HKPD dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkesinambungan, melindungi masyarakat dari risiko fiskal dengan menjaga *prudentality* pembiayaan utang daerah serta memberikan jaminan

layanan dan kesejahteraan dalam kondisi darurat.

Pada akhirnya, UU HKPD dapat memperkuat kualitas desentralisasi fiskal dengan meletakkan tanggungjawab yang lebih kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan pemeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Sosialisasi HKPD: Komitmen Bersama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi**

Sebagai komitmen bersama Pemerintah dan DPR RI dalam menyebarluaskan UU HKPD, telah dilaksanakan Sosialisasi UU HKPD yang dimulai dengan pelaksanaan *Kick-off* Sosialisasi UU HKPD pada tanggal 10 Maret 2022 di Kabupaten Demak bersama Menteri Keuangan dan Wakil Ketua Komisi XI DPR. Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi dilanjutkan di 7 lokasi, yakni Kabupaten Kudus, Provinsi Sumatera Selatan, Kota Batu, Kabupaten Ciamis, Provinsi Riau, Kota Bandung, dan Kota Makassar.

## **Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kebijakan Fiskal yang Berkualitas**

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan tema “Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah untuk Kebijakan Fiskal yang berkualitas”. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi tersebut adalah untuk meningkatkan sinergi dan keselarasan dalam penyusunan kebijakan antara pusat dan daerah khususnya terkait PNB dan Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah. DJPK yang mengelola setidaknya sepertiga APBN dalam bentuk dana TKD, sehingga kualitas pengelolaan TKD akan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan APBN secara keseluruhan. Mengingat hal tersebut, diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholder DJA dan DJPK. Dengan “Sinergi Fiskal Pusat dan Daerah untuk Kebijakan Fiskal yang Berkualitas”, diharapkan dapat mengatur upaya untuk sinergi fiskal nasional, dengan tujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis, sehingga target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang

tinggi dapat lebih mudah dicapai, dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif. Dengan demikian, kerjasama yang baik antara DJPK dan DJA merupakan kewajiban agar anggaran yang begitu besar yang dikelola dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan nyata.

## **Penguatan *Local Taxing* Power serta Sinergi Pusat dan Daerah**

Pengesahan UU HKPD menyusuli disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada bulan Oktober 2021, yang dimaksudkan untuk perbaikan kebijakan perpajakan di sisi pajak pusat. Sejalan dengan salah satu pilar UU HKPD yaitu local taxing power, Pemda dan Kemenkeu bersama-sama saling membantu bagaimana daerah dapat meningkatkan local taxing power, yang dapat diketahui saat ini masih banyak daerah yang mempunyai potensi besar, namun belum dapat direalisasikan dengan baik. Sebelumnya pada tahun 2019 telah diinisiasi suatu kegiatan sinergi antara DJP, DJPK, yang dilandasi Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen

Perimbangan Keuangan serta pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemda.

Inti dari kegiatan PKS tersebut adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan antar fiskus pusat dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan WP melalui kegiatan analisis dan pengawasan WP Bersama, dengan tetap berada dalam koridor kerahasiaan data perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan penunjang yang juga penting utamanya berupa dukungan peningkatan kapasitas aparatur perpajakan daerah.

Pelaksanaan kegiatan PKS ini dimulai pada 16 Juli 2019 dengan 7 Pemda kota pilot, dan telah diperluas dalam 2 tahap selanjutnya, yaitu pada 26 Agustus 2020 dengan 78 Pemda, dan kemudian pada 21 April 2021 dengan 83 Pemda, sehingga total 168 Pemda telah menjadi peserta kegiatan PKS ini. Selanjutnya pada PKS ini, melalui perluasan

Tahap IV, progress perluasan Pemda peserta PKS akan bertambah sebanyak 86 Pemda sehingga total Pemda peserta PKS akan mencapai 254 Pemda atau 46,86 persen dari seluruh Pemda. Adapun pelaksanaan PKS Tahap I s.d. III telah menghasilkan capaian/ manfaat baik dari sisi Pusat maupun Pemda, utamanya berupa tambahan potensi dan realisasi penerimaan pajak.

# Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko:

Mendukung Peran APBN Untuk Melindungi Masyarakat,  
Ekonomi, dan Keberlanjutan Fiskal

---

Tahun 2022 menjadi tahun yang cukup krusial bagi Indonesia. Selain dihadapkan pada tantangan pandemi yang mulai mereda, tantangan global baik dari sisi ekonomi, geopolitik, maupun keuangan juga turut menambah cerita APBN 2022 dalam mengoptimalkan perannya sebagai *shock absorber* untuk Melindungi Masyarakat, Ekonomi, dan Keberlanjutan Fiskal. Di tengah kerja keras tersebut, pembiayaan hadir menjadi instrumen penting dalam mendukung dan menguatkan pondasi APBN.

## **Pembiayaan Utang**

Dengan mengusung prinsip pengelolaan utang yang prudent, fleksibel dan oportunistik, pembiayaan utang dalam APBN 2022 berjalan terukur disertai kinerja APBN dan tren pemulihan yang terjaga baik. Sumber

pembiayaan dari pasar domestik tetap menjadi salah satu primadona untuk instrumen pemerintah yang pengadaannya dilakukan melalui metode lelang, *book building*, dan *private placement*.

Salah satu jenis SBN yaitu SBN Ritel menjadi sarana alternatif pembiayaan dalam rangka pendalaman pasar dan kemandirian pembiayaan serta sarana investasi bagi masyarakat. Pembeli SBN Ritel mempunyai karakteristik yaitu harus merupakan Warga Negara Indonesia. Untuk SBN Ritel ini, sepanjang tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan 7 seri SBN Ritel yang terdiri dari: Obligasi Negara Ritel seri ORI021 dan ORI022, *Saving Bonds Retail* seri SBR011, Sukuk Ritel seri SR016 dan SR017, Sukuk Wakaf seri SWR003 dan Sukuk Tabungan seri ST009. Di tengah kondisi

ORI  
Obligasi RitelSBR  
Surat Berjangka

• 23 Februari 2022  
ORI021



• 26 Oktober 2022  
ORI022



• 22 Juni 2022  
SBR010

sukuk ritel  
sukuk ritel

ORI 021

SBR 010

• 23 Maret 2022  
ORI021



• 21 September 2022  
ORI022



• 13 Juli 2022  
SWR003



• 7 Desember 2022  
SBR010



yang penuh ketidakpastian, SBN Ritel terbilang sukses mendapat perhatian dari masyarakat dengan total penjualan lebih dari Rp107 triliun dan berasal dari 186.028 investor, di mana 94.696 di antaranya adalah investor baru.

Selanjutnya, instrumen SBN untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG) juga telah diluncurkan Pemerintah sejak tahun 2021. Kemudian menyusul keberhasilan penerbitan *SDG's Bonds* yang debut di pasar global tahun 2021, pada tahun 2022 untuk pertama kalinya pemerintah melakukan transaksi *SDG's Bond* di pasar domestik dengan menerbitkan Surat Utang Negara melalui mekanisme lelang. Penerbitan ini kembali menguatkan komitmen pemerintah untuk pembiayaan proyek-proyek sosial dan lingkungan hidup

untuk mewujudkan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga menawarkan *Green Sukuk* melalui lelang di pasar perdana domestik guna mendukung program Rasio Pembiayaan Inklusif Makropudensial.

Harus diakui bahwa pandemi merupakan *game changer* yang secara pasti telah berpengaruh signifikan pada perekonomian dunia. Dibutuhkan terobosan yang luar biasa agar ekonomi terdampak minimal akibat pandemi. Salah satu hal luar biasa yang dilakukan Pemerintah dengan BI adalah membentuk sinergi sehingga ekonomi tetap terjaga dan rakyat yang terdampak dapat perlindungan agar dapat bertahan dalam kondisi yang tidak menentu. Selama tiga tahun terakhir, sinergi yang apik dari Kemenkeu dan BI dalam mendukung penanganan

pandemi dan pemulihan ekonomi nasional ditunjukkan melalui implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) I-III antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. SKB I di mana BI sebagai *standby buyer* pembelian SBN melalui lelang di pasar domestik dalam kondisi pasar SBN tertekan mencatat realisasi sebesar Rp75,86 triliun pada tahun 2020, Rp143,3 triliun pada tahun 2021, dan Rp49,11 triliun pada tahun 2022. Sementara skema *burden sharing* sebagaimana SKB II yang hanya berlaku di tahun 2020 telah diterbitkan sebesar Rp397,56 triliun untuk *Public Goods* dan Rp177,03 triliun untuk *non-public goods*. Terakhir, penerbitan SBN dalam rangka SKB III yang diperuntukkan guna kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan mencapai Rp215 triliun pada tahun 2021 dan Rp224 triliun pada tahun 2022.

Selain di pasar domestik, SBN dalam valuta asing juga diterbitkan Pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan pembiayaan APBN di tahun 2022. Penerbitan SBN Valas bertujuan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dengan tetap memperhatikan biaya dan risiko yang efisien. Dimulai dari penerbitan *Global Bond* pada bulan Maret senilai USD1,75 miliar, di mana sebesar

USD500 juta di antaranya merupakan transaksi *Liability Management*. Kemudian pada bulan Mei dan Juni pemerintah berturut-turut menerbitkan *Global Sukuk* dan *Samurai Bond*. Penerbitan *Global Sukuk* pada tahun 2022 terealisasi sebesar USD3,25 miliar termasuk di dalamnya penerbitan *Green Sukuk* dengan tenor 10 tahun untuk pertama kali. Sementara untuk *Samurai Bond* terealisasi sebesar JPY 81 miliar tercatat sebagai penerbitan *Samurai Bonds* terbesar oleh *sovereign issuer* selama tahun ini. Penerbitan SBN Valas di tahun 2022 diakhiri dengan penerbitan *Global Bond* pada bulan September senilai USD2,65 miliar, di mana sebesar USD325,2 juta merupakan transaksi *Liability Management*. Penerbitan SBN Valas yang selalu mencatatkan *oversubscribed* juga menunjukkan bahwa Obligasi Pemerintah Indonesia masih cukup diminati di pasar asing.

Capaian lain yang tercatat untuk tahun 2022 adalah Pemerintah juga berhasil menerbitkan SBN dalam periode Januari sampai dengan November 2022 melalui PPS yang dimulai sejak 2022. Penerbitan ini

diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan dan mengalihkan harta/asetnya kepada investasi dalam bentuk SBN. Kontribusi penerbitan SBN dalam rangka PPS mencapai Rp5,17 triliun dan USD63,31 juta.

Selanjutnya, selama tahun 2022 pemerintah mengalokasikan SBSN untuk membiayai proyek infrastruktur pada 12 (dua belas) K/L dengan nilai pembiayaan sebesar Rp29,54 Triliun yang terdiri dari 880 proyek. Sejumlah proyek tersebut di antaranya untuk membangun jalan dan jembatan, infrastruktur SDA, transportasi darat, laut dan udara, fasilitas pertanian, perumahan, gedung perguruan tinggi dan lain-lain.

Selain menerbitkan SBN, Pemerintah juga memanfaatkan pinjaman sebagai sumber pembiayaan. Beberapa pinjaman tunai di tahun 2022 ditujukan untuk memenuhi pembiayaan dalam rangka menghadapi masa pemulihan pasca-pandemi Covid-19, antara lain *Human Capital* dari *World Bank* sebesar EUR331,30 juta, *Boosting Productivity and Human Capital Program-1* dari ADB sebesar USD500juta, *Competitiveness*

*and Industrial Modernization and Trade Acceleration Program -1* dari *Asian Development Bank* sebesar USD500juta, dan *Financial Sector Reform DPL 2* dari *World Bank* sebesar USD400juta. Di samping itu, masih terdapat terdapat beberapa loan lain yang masih ditujukan guna memenuhi pembiayaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, yaitu *Additional Financing Indonesia Emergency Response to COVID* yang berasal dari *World Bank* sebesar USD500juta, *co-financing* dengan AIIB (USD 500 juta) dan Kfw (USD200juta)

Pengakuan atas kredibilitas pengelolaan utang Pemerintah juga tercermin dari peringkat utang yang diberikan oleh lima lembaga pemeringkat utang tingkat dunia. Sepanjang tahun 2022, lembaga pemeringkat kredit mengafirmasi bahwa kondisi ekonomi Indonesia lebih aman dibanding beberapa negara di tengah kondisi yang volatile. Bahkan S&P yang merevisi *outlook* Indonesia menjadi *negative* pada awal pandemi, pada tahun 2022 merevisi *outlook* peringkat kredit Indonesia menjadi *stable* kembali. Terakhir, pada bulan Desember 2022,

lembaga pemeringkat *Fitch Rating* mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi *BBB outlook stable*. Realita ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban utangnya di masa mendatang dan memiliki risiko kecil untuk terjebak dalam utang. Selain itu, ekonomi Indonesia juga dianggap resilient dan efektif dalam menjalankan kebijakan makroekonomi dan moneter.

### **Pembiayaan non-Utang**

Pembiayaan utang memang merupakan salah satu instrumen pembiayaan Pemerintah, namun dalam praktiknya, Pemerintah juga terus menggali alternatif pembiayaan non-utang untuk mengurangi beban APBN. Salah satu inovasi pembiayaan infrastruktur adalah melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Hingga akhir Desember 2022, 31 proyek KPBU telah ditandatangani dengan total nilai investasi sebesar Rp244,16 triliun. Sebanyak 10 proyek telah mulai beroperasi termasuk Palapa Ring, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat dan SPAM Umbulan, serta beberapa ruas jalan tol seperti Batang-Semarang dan Manado Bitung, 15 proyek dalam tahap

konstruksi, dan sisanya masih dalam proses pra-konstruksi. Menurut sektornya, skema KPBU turut berkontribusi untuk pembangunan 19 proyek jalan, 10 proyek penyediaan air minum, 3 proyek di bidang energi, 4 proyek *Information Communication Technology* (ICT), dan 6 proyek transportasi.

Selain itu, di bidang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Mitigasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) telah menyusun *framework Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam penyediaan dukungan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU. Pemberian *Project Development Facility* (PDF) melalui skema KPBU dimanfaatkan untuk membantu proyek yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Pemberian dukungan *Viability Gap Fund* (VGF) dan penjaminan pemerintah akan diberikan setelah melalui penilaian kepatuhan proyek pada prinsip/ standar ESG. *Framework* dan *Manual ESG* ini telah diluncurkan secara



resmi oleh Menteri Keuangan pada agenda G20 di Bali pada tanggal 12 November 2022.

Sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional, sejak tahun 2020 pemerintah menyediakan penjaminan atas kredit modal kerja (KMK) untuk UMKM. Penjaminan KMK ini menjadi upaya responsif pemerintah untuk mendorong peran penting perbankan dalam mendukung bangkitnya usaha pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Selama kurun waktu 2020-2022, program ini telah berhasil menjangkau 3,21 juta pelaku usaha UMKM dan 76 pelaku usaha korporasi. Program penjaminan tersebut berkontribusi mempertahankan dan membangkitkan sektor dunia usaha yang ikut terdampak pandemi.

Selain itu, dalam upaya kontribusi dan bentuk solidaritas Indonesia untuk mendukung pembangunan dunia, terutama dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta pemberian uluran tangan pada negara sahabat yang mengalami bencana, pemerintah Indonesia melalui Lembaga Dana Pembangunan Kerjasama Internasional

(LDKPI) memberikan hibah terhadap 9 Negara, antara lain berupa *capacity building* serta bantuan kemanusiaan karena bencana dan pandemi Covid-19. Selain itu, Indonesia juga memberikan hibah berupa Lokakarya *Passenger Profiling* untuk Pegawai Administrasi Pabean kepada beberapa negara Asia dan Pasifik serta Pelatihan di Bidang Perikanan untuk Negara-Negara Anggota *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dalam Mendukung Implementasi *MSG Roadmap for Inshore Fisheries Management and Sustainable Development 2015-2024*.

# Inspektorat Jenderal:

## Penguatan Peran Pengawasan Inspektorat Jenderal

Sepanjang 2022

---

Inspektorat Jenderal mengawali tahun 2022 dengan melakukan koordinasi Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) bersama klien pengawasannya. Koordinasi atau audiensi PKPT ini dilakukan untuk menjaga komitmen, mempermudah akses, dan meningkatkan keterbukaan dengan klien pengawasan. Dalam menyusun PKPT, Inspektorat Jenderal juga harus memperhatikan arahan dari Menteri Keuangan dan lebih menekankan pada kegiatan pencegahan.

Inspektur Jenderal Awan Nurmawan Nuh mengingatkan kembali bahwa Inspektorat Jenderal bukan mencari kesalahan, namun ingin menjadi *strategic partner* dan *trusted advisor*. Klien pengawasan pun berharap bahwa Inspektorat Jenderal tidak hanya menjadi *trusted*

*advisor*, tetapi juga bisa menjadi *reliable partner* yang memberikan saran dan pengetahuan yang *reliable*.

Dalam memenuhi tuntutan klien pengawasan dan pemangku kepentingan serta guna menghadapi tantangan era disrupsi, Inspektorat Jenderal harus bertransformasi untuk menjadi mitra strategis dan tepercaya dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Jenderal diharapkan mampu mewujudkan pengawasan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pengawasan Inspektorat Jenderal ini juga selaras untuk mendukung tiga peran Menteri Keuangan sebagai *Chief Operational Officer (COO)*, *Chief Financial Officer (CFO)*, serta Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).

Pada Maret 2022, Inspektorat Jenderal menerbitkan PMK Nomor 18/PMK.09/2022 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam KND. PMK ini diharapkan dapat melingkupi penguatan peran pengawasan Inspektorat Jenderal. Sampai dengan akhir tahun 2021, pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terkait dengan fungsi pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam KND masih belum diatur secara tegas dan permanen.

Adanya PMK 18/PMK.09/2022 ini menegaskan kembali kewenangan Inspektorat Jenderal dan menjadi milestone penting untuk memenuhi kebutuhan pengawasan secara komprehensif terhadap tiga peran Menteri Keuangan. Dalam rangka mendukung penguatan fungsi ini, Inspektorat Jenderal juga telah membentuk tim kerja transformasi pada bulan April. Tim ini bertugas untuk melakukan analisis atas isu terkini, memberikan pendapat dan masukan berdasarkan kajian, serta menyediakan

sumber daya manusia dalam hal diperlukan.

Pada bulan Juni, Inspektorat Jenderal telah menyusun *framework* transformasi dan *action plan* transformasi 2022-2026. *Framework* dan *action plan* ini mencakup penguatan aspek proses bisnis pengawasan, sumber daya, dan teknologi informasi, serta penguatan sinergi dan kolaborasi Inspektorat Jenderal dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Kemenkeu yang terlibat dalam ekosistem pengawasan keuangan negara.

Selama tahun 2022, Inspektorat Jenderal, sesuai dengan mandat pengawasan yang diberikan oleh Menteri Keuangan dalam PMK 18/PMK.09/2022, juga melakukan pengawasan atas pengelolaan PMN, penjaminan, subsidi, dan transfer ke daerah, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam menjaga dan memitigasi risiko fiskal. Adanya PMK-18/PMK.09/2022 ini memperluas cakupan pengawasan pengelolaan keuangan negara, yang dapat mencakup 87 K/L, 78 BUMN, 38 provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.961

Desa, yang mendapatkan dana Bendahara Umum Negara (BUN).

Dalam rangka memberikan hasil yang lebih maksimal atas pengawasan pengelolaan keuangan negara yang semakin luas, Inspektorat Jenderal mengembangkan konsep *combined assurance*. *Combined assurance* sebagai salah satu strategi penguatan sinergi dan kolaborasi antara Inspektorat Jenderal dengan manajemen (*first line*), unit kepatuhan internal (*second line*), APIP K/L/D, serta Satuan Pengawas Internal BUMN/BLU untuk mewujudkan pengawasan keuangan negara yang komprehensif dan terintegrasi. Inspektorat Jenderal juga terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan melalui optimalisasi *data analytics* serta pengembangan konsep sistem informasi pengawasan keuangan negara yang terintegrasi.

Tahun berikutnya, transformasi pengawasan pengelolaan keuangan negara akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara Inspektorat Jenderal dengan konsultan transformasi. Dukungan konsultan tersebut diharapkan dapat memperkuat *action plan* transformasi yang telah disusun serta menyempurnakan konsepsi dan *implementasi combined assurance, data analytics,*

desain sistem informasi pengawasan keuangan negara yang terintegrasi. Selain itu, diharapkan pula mampu membantu pengembangan organisasi dan sumber daya yang fit untuk mendukung keberlanjutan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Tahun 2022, Inspektorat Jenderal juga melakukan berbagai kolaborasi. Salah satunya terkait pengembangan aplikasi manajemen pengawasan PNBPN berbasis elektronik yaitu e-Mawas PNBPN pada bulan April. Aplikasi ini merupakan perwujudan kolaborasi antar APIP kementerian dan lembaga dalam mengawal APBN secara terintegrasi.

Aplikasi e-Mawas PNBPN yang sebelumnya dikelola oleh Inspektorat Jenderal akan dimigrasikan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Penguatan pengawasan PNBPN untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi dalam mendukung *good governance* serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pengawasan PNBPN.

Sepanjang tahun 2022, Inspektorat Jenderal bersama manajemen sebagai lini pertama dan Unit Kepatuhan



Internal (UKI) sebagai lini kedua juga terus melakukan kolaborasi dalam internalisasi penanganan benturan kepentingan, pelaporan gratifikasi, serta budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM) menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan unit dalam penerapan budaya antikorupsi.

Mulai tahun 2022 ini pun, Inspektorat Jenderal berperan sebagai Tim Penilai Kementerian untuk melakukan asistensi dan penilaian terhadap unit yang diusulkan untuk mendapatkan penilaian dari Kementerian PAN RB. Harapannya, unit kerja WBK/WBBM di Kemenkeu akan terus bertambah sehingga

budaya kerja yang bebas dari KKN, berkinerja tinggi, dan dapat memberikan pelayanan yang prima akan semakin tumbuh dan berkembang di lingkungan Kemenkeu.

Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Kemenkeu Tahun 2022 di bulan Desember, Wakil Menteri Keuangan mengukuhkan 269 unit kerja berpredikat WBK/WBBM di lingkungan Kemenkeu. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan juga mengukuhkan pengurus PAKSI (Penyuluh Antikorupsi) yang beranggotakan 412 dari seluruh unit eselon I Kemenkeu dan 3 orang API (Ahli Pembangun Integritas) dengan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK).

Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022 ini sebagai momentum sinergi dan kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan memperkuat budaya antikorupsi sehingga akan tercipta kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kerja sama antarinstansi dan lembaga, khususnya dalam menjaga kinerja dan semangat integritas yang semakin kuat, diharapkan pengelolaan keuangan negara pun lebih optimal.

Sepanjang tahun 2022, Inspektorat Jenderal juga masih meneruskan program “Irjen Menyapa” dengan lebih komprehensif dan tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan. Irjen Awan dan jajaran eselon II dalam kunjungan ke unit vertikal di daerah, sekaligus berkoordinasi dengan APIP daerah untuk memperkuat ekosistem pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Inspektorat Jenderal senantiasa berkoordinasi dengan manajemen dan jajaran pimpinan untuk terus berinovasi dalam menentukan metode yang memadai untuk mengantisipasi isu *fraud* di lingkungan Kemenkeu. Inspektorat Jenderal juga telah menyediakan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai dan

masyarakat untuk bersama-sama mendeteksi isu atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai. Pengaduan tersebut dilakukan melalui aplikasi *Wistle Blowing System* (WISE) dengan prinsip rahasia, mudah dan cepat, dan terintegrasi. Hingga kini, Inspektorat Jenderal sedang merumuskan mekanisme perlindungan bagi pelapor.

Inspektorat Jenderal berkomitmen dalam mewujudkan budaya integritas di lingkungan Kemenkeu melalui implementasi Kerangka Kerja Integritas (KKI) Kementerian Keuangan. Secara nasional, tujuan KKI adalah terwujudnya kehidupan berbangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas. Sedangkan secara organisasi, KKI bertujuan untuk tewujudnya pejabat/pegawai Kemenkeu yang memiliki cara pikir, cara kerja, sikap, dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas.

Budaya integritas ini memerlukan sinergi, kolaborasi, dan peran aktif baik dari seluruh pegawai maupun pimpinan unit kerja untuk membangun integritas dan mewujudkan *clean government* serta *good governance*.

# Badan Kebijakan Fiskal

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) merangkum beberapa peristiwa besar yang terjadi pada 2022, sebagai berikut:

## 25 Januari 2022

Indonesia Mendorong Keuangan Berkelanjutan yang Mudah Diakses dan Terjangkau untuk Pulih Bersama Bangkit Lebih Kuat dalam Pertemuan Pertama G20 *Sustainable Finance Working Group* (SFWG). SFWG mengadakan pertemuan pertamanya di bawah Presidensi G20 Indonesia dalam acara yang diselenggarakan oleh Kemenkeu dan BI pada tanggal 25 Januari 2022 secara virtual. Pertemuan dibuka oleh Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, Kementerian Keuangan.

## 2 Februari 2022

Pemerintah melanjutkan dukungan terhadap sektor otomotif melalui perpanjangan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor. PMK Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. PMK ini berisi desain baru insentif yang disesuaikan dengan kondisi pemulihan sektor otomotif ke depan.

## 2 Februari 2022

Pemerintah melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah di Tahun 2022 selama 9 bulan sebagai salah satu bentuk

dukungan terhadap sektor perumahan. Kelanjutan insentif PPN DTP Rumah ini tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

### **22 Februari 2022**

Pemerintah menetapkan tarif khusus Bea Masuk nol persen untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap (*Incompletely Knocked Down/IKD*) melalui PMK Nomor 13/PMK.010/2022 tentang Perubahan Keempat Atas PMK Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Insetif ini dilakukan untuk mendorong Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.

### **Mei 2022**

Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR dalam Rapat Paripurna DPR ke-22. Dokumen KEM PPKF Tahun 2023 ini merupakan gambaran awal sekaligus

skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia.

### **Juli 2022**

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Jenderal *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) Mathias Corman telah menandatangani pembaruan Perjanjian Kerangka Kerja Sama Indonesia-OECD (*Framework of Cooperation Agreement/FCA*) untuk lima tahun ke depan dan meluncurkan Program Kerja Bersama (*Joint Work Programme/JWP*) sebagai panduan kerja sama kedua pihak selama tahun 2022-2025. JWP ini akan mendukung Indonesia dalam mendorong reformasi kebijakan sesuai agenda prioritas pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mencapai pemulihan yang resilien dan berkelanjutan dari krisis Pandemi Covid-19,



dan mendekatkan pada standar kebijakan dan praktik OECD.

### 15 Juli 2022

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (*Finance Ministers & Central Bank Governors' Meeting / FMC BG*) Negara G20 resmi dimulai secara *hybrid* di Nusa Dua, Bali. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga FMCBG pada jalur keuangan (*finance track*) di bawah Presidensi Indonesia, setelah sebelumnya diselenggarakan pada bulan Februari 2022 di Jakarta dan April 2022 di Washington D.C. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 tersebut bertujuan mendorong ekonomi global mencapai pemulihan bersama yang lebih kuat di tengah meningkatnya tantangan yang semakin mengemuka.

### 24-25 Agustus 2022

Guna mengelaborasi peran dan pengembangan keuangan syariah untuk UMKM, Kementerian Keuangan kembali menyelenggarakan *The Annual Islamic Finance Conference* (The AIFC) ke-6 yang dilangsungkan secara *virtual*. Tema yang

diangkat dalam AIFC ke-6 adalah "*Islamic Finance Role in MSMEs Empowerment: Boosting Capability and Fostering Inclusiveness for Sustainable Future*". Konferensi ini diharapkan dapat menjangkau masukan dan rekomendasi yang nyata sehingga keuangan syariah dapat berkontribusi lebih besar bagi sektor UMKM dan berkembang lebih pesat.

### 13 November 2022

Puncak Pertemuan Gabungan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 Mengukuhkan Komitmen Memperkuat Arsitektur Kesehatan Global Bali pada tanggal dalam *Second G20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting* (JFHMM) di Bali. JFHMM yang ke-2 ini diselenggarakan untuk mendiskusikan dan meng-*update* beberapa kemajuan yang dicapai oleh *Joint Finance and Health Task Force* (JFHTF) terkait: (i) perkembangan dari pembentukan *Financial Intermediary Fund* (FIF) atau *Pandemic Fund* untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Penanggulangan Pandemi (PPR); dan (ii) Koordinasi antara Keuangan dan Kesehatan untuk PPR pandemi. Penguatan arsitektur kesehatan global merupakan

kebutuhan mendesak dalam memastikan sistem kesehatan di tingkat nasional, regional dan global, memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengantisipasi pandemi di masa mendatang. Dalam pertemuan ini para Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan mendengarkan *update* mengenai perkembangan termasuk panduan strategi *Pandemic Fund*.

### **Desember 2022**

Kemenkeu menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (*Tax Expenditure Report*) tahun 2021 yang menginventarisasi berbagai insentif perpajakan, baik dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, percepatan pemulihan ekonomi, maupun insentif perpajakan untuk mendukung kinerja ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Laporan Belanja Perpajakan tahun 2021 menjadi dokumen penting untuk menginventarisasi dan mengevaluasi berbagai insentif perpajakan dan menjadi dasar evaluasi kebijakan 2022.

### **15 Desember 2022**

Dalam Rapat Paripurna Pembahasan Tingkat II RUU P2SK, Pemerintah dan DPR menyepakati untuk melaksanakan reformasi sektor keuangan ini, melalui RUU P2SK yang merupakan *omnibus*

*law*. Reformasi di sektor keuangan memiliki urgensi yang tinggi untuk mendukung perekonomian nasional, yang didasari antara lain adanya (i) tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, (ii) terbatasnya instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (iii) rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau, serta (iv) kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk dua tahun ke depan melalui penerbitan PMK Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris. Penetapan kebijakan penyesuaian tarif CHT tersebut telah mempertimbangkan aspek ekonomi, ketenagakerjaan, keberlanjutan industri rokok, dan upaya pengendalian peredaran rokok ilegal. Tarif cukai dan batasan minimum Harga Jual Eceran (HJE) yang baru, mulai berlaku sejak 1 Januari 2023.

BKF menyelenggarakan the *11th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED)* dengan tema "*Post Pandemic Economic Policy: Coping with Uncertainties and Seizing New Growth Opportunities*". AIFED merupakan kegiatan tahunan yang menggalang partisipasi akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan untuk membahas solusi konkret bagi masalah ekonomi dan sosial yang muncul di Indonesia. Acara ini merupakan kerja sama antara Kemenkeu dengan berbagai mitra seperti *Asian Development Bank (ADB)*, PROSPERA, dan GIZ. Wakil Menteri Keuangan RI dalam acar tersebut menyampaikan empat pelajaran penting dari pengambilan kebijakan di masa krisis akibat pandemi. Pertama, pentingnya ketersediaan dan kualitas data sebagai dasar kebijakan publik. Kedua, pentingnya tata kelola yang baik dalam perumusan kebijakan, bahkan sejak sebelum terjadinya pandemi.

Ketiga, bauran kebijakan dan koordinasi yang kuat antar otoritas/lembaga, karena tidak mungkin mengharapkan keberhasilan dari kebijakan tunggal dari sebuah institusi dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis. Keempat, keterkaitan antara keberhasilan penanganan kesehatan dan kinerja perekonomian.

# Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

---

## Januari 2022

Mengawali tahun angka kembar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyelenggarakan *Town Hall Meeting* yang dipimpin langsung oleh Kepala BPPK, Andin Hadiyanto, pada 18 Januari 2022. *Town Hall Meeting* ini merupakan sarana rutin bagi para pegawai untuk berdialog dua arah dengan jajaran pimpinan BPPK. Pada *Town Hall Meeting* pertama di tahun 2022, kegiatan diisi dengan BPPK 2021 *Rewind*, pembacaan *anchor statement* BPPK, *wishlist* pegawai BPPK, BPPK Mendengar, dan Penganugerahan Liga Inovasi 2021.

## Februari 2022

Pada 8-9 Februari 2022, Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai *Regional Training Center* Indonesia menyelenggarakan *International Conference on Customs and Tax Cooperation*. Kegiatan ini menghadirkan pembicara dari perwakilan *World Customs Organization* (WCO), perwakilan OECD, praktisi dari DJP, dan praktisi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan ini diikuti oleh 904 peserta pada hari pertama dan 758 orang peserta pada hari kedua yang berasal dari 15 negara di kawasan Asia Pasifik.

## Maret 2022

Sebagai unit pengelola pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, BPPK menyelenggarakan *Learning Engagement Forum* atau LEF, yang merupakan media forum komunikasi Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Bagian Pengembangan Unit Eselon I dan Lembaga *National Single Window* (LNSW) dengan Pusdiklat dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Forum ini diselenggarakan pada 23 Maret 2022, yang bertujuan menindaklanjuti dan mempersiapkan pelaksanaan *Pra-Learning Council Meeting* (Pra-LCM)/Forum Sekretaris Unit Eselon 1 di lingkungan Kemenkeu dalam mendukung pelaksanaan LCM.

## April 2022

Setelah *Learning Engagement Forum* terlaksana, selanjutnya BPPK menyelenggarakan Pra-LCM pada 5 April 2022 yang dihadiri oleh Kepala BPPK, Kepala Biro SDM dan para Sekretaris Unit Eselon I dan LNSW untuk mengonfirmasi atas berbagai isu strategis di Unit Eselon I dan LNSW yang perlu mendapatkan dukungan pembelajaran dan manajemen pengetahuan sekaligus mempersiapkan pelaksanaan LCM.

Sepekan setelah Pra-LCM dilaksanakan, LCM dihelat sebagai forum tertinggi pimpinan Kemenkeu yang menentukan arah kebijakan pembelajaran, manajemen pengetahuan, dan pendidikan PKN STAN. LCM memegang peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkeu. Pada LCM 2022, Menteri Keuangan menekankan adanya pemetaan pengetahuan serta analisa gap antara pengetahuan yang sudah di-*capture* dengan kebutuhan faktual di organisasi. Beliau juga berharap agar DNA para pegawai Kemenkeu terbiasa dengan *knowledge capture* dan *knowledge culture* untuk mewujudkan Kemenkeu sebagai *Learning Organization*.

Kegiatan LCM 2022 kembali menjadi sarana BPPK untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tiga arah kebijakan pembelajaran meliputi *Joint Program*, Pembelajaran Terintegrasi, dan *Levelling* Pembelajaran, serta upaya BPPK dalam mendukung pengembangan kompetensi SDM dalam menjawab tantangan dan isu strategis di level Kemenkeu dan Unit Eselon I.

Pada bulan ini pula, diselenggarakan *Town Hall Meeting* kedua BPPK pada 27 April 2022 dengan tema "BPPK Terkini" dengan bahasan utama mengenai LCM tersebut.



### Mei 2022

Pada pengujung Mei, BPPK menyambut Wakil Menteri Keuangan Republik Demokratik Timor Leste. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin penting mengenai dukungan BPPK dalam upaya peningkatan dan pengembangan SDM keuangan pada reformasi keuangan yang tengah dicanangkan oleh Kemenkeu Timor Leste. Kepala BPPK menyatakan kesediaannya untuk memberikan asistensi dalam pembangunan *training center*.

### Juni 2022

Terhitung sejak Juni 2022, *Central Transformation Office* (CTO) berkolaborasi dengan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK menyelenggarakan program *Workshop Road to Data Analytics* Kemenkeu (Rodaku). *Kick-Off* Rodaku dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, dan Kepala BPPK Andin Hadiyanto.

Implementasi *Learning Organization* (LO) di lingkungan Kemenkeu yang diinisiasi BPPK mulai digalakkan. Untuk menelaraskan pengukuran tingkat implementasi tersebut, BPPK menyelenggarakan *Entry Meeting Learning Organization* Kemenkeu 2022, pada 9 Juni 2022. Kegiatan ini juga menjadi awal mula perwujudan komitmen dan keseriusan Kemenkeu menjadi sebuah LO.



### 9 Juni 2022

Terhitung sejak Juni 2022, *Central Transformation Office* (CTO) berkolaborasi dengan Pusdiklat Keuangan Umum BPPK menyelenggarakan program *Workshop Road to Data Analytics* Kemenkeu (Rodaku). *Kick-Off* Rodaku dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Heru Pambudi, dan Kepala BPPK Andin Hadiyanto.

Implementasi LO di lingkungan Kemenkeu yang diinisiasi BPPK mulai digalakkan. Untuk menyelaraskan pengukuran tingkat implementasi tersebut, BPPK menyelenggarakan *Entry Meeting Learning Organization* Kemenkeu 2022, pada 9 Juni 2022. Kegiatan ini juga menjadi awal mula perwujudan komitmen dan keseriusan Kemenkeu menjadi sebuah LO.

### 13 Juni 2022

Pusdiklat Bea dan Cukai menerima kunjungan dari Atase Bea Cukai New Zealand. Kunjungan ini salah satunya membahas rencana kolaborasi pelatihan di masa mendatang.

Dari PKN STAN, pada 22 Juni 2022 telah diresmikan pendirian *Sustainable Delevelopment Goals Desa Center* yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. *Sustainable Development Goals Desa Center* merupakan program kerja sama antara PKN STAN dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT). Selang dua hari, PKN STAN turut serta dalam 2nd Jambore Badan Usaha Milik Desa 2022 dengan melakukan *Launching* Pendampingan PKN STAN terkait program perbantuan

tenaga ahli, pelatihan BUM Desa, dan pendampingan pengelolaan keuangan BUM Desa. Acara tersebut diselenggarakan pada Jumat, 24 Juni 2022 di BUM Desa Sukosari Makmur, Trawas, Jawa Timur.

### **5-7 Juli 2022**

Kegiatan *Executive Training Optimizing Collaborative Leadership* menjadi pembuka bulan Juli yang merupakan *executive training* pertama yang diselenggarakan sendiri oleh Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Acara ini diselenggarakan di Yogyakarta, 5-7 Juli 2022 dengan jumlah peserta 35 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

### **28 Juli 2022**

Kepala BPPK Andin Hadiyanto menghadiri *Stakeholders Gathering 2022* sekaligus peresmian gedung asrama Pusdiklat Keuangan Umum. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh *stakeholders* Pusdiklat Keuangan Umum.

### **29 Juli 2022**

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri Dies Natalis ke-7 PKN STAN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan sekaligus meresmikan Gedung Nusantara

sebagai gedung pendidikan PKN STAN.

### **3 Agustus 2022**

BPPK menggelar Forum Koordinasi Pembelajaran Keuangan Negara Bidang Anggaran dan Perbendaharaan. Forum tersebut dihadiri oleh 98 peserta dari 27 K/L dan menghasilkan identifikasi kebutuhan pembelajaran keuangan negara yang berasal dari K/L, penguatan sinergi dan kolaborasi, serta komitmen K/L dalam meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan negara di lingkungan K/L.

Pada bulan kemerdekaan ini, BPPK kembali menggelar Kemenkeu Learning Festival (KLF) tahun 2022 yang mengusung tema "Bersama Menguatkan Kemenkeu sebagai *Learning Organization*". Rangkaian acara ini dibuka dengan acara LOKeR Spesial, dilanjutkan dengan *Learning Bootcamp, Learning Competition, Kemenkeu Learning Week, Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN)*, dan puncaknya pada *Be A Champion*. KLF menghadirkan beragam narasumber mulai dari internal Kemenkeu, praktisi eksternal, hingga internasional.



## September 2022

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia kini bertransformasi menjadi Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial (Pusdiklat KM) sesuai dengan amanat PMK Nomor 118 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Pada bulan ini, BPPK kembali ditetapkan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Keuangan Negara selama 5 tahun ke depan terhitung sejak 2022. Melalui mandat ini, BPPK memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut akreditasi terhadap program pelatihan teknis di Bidang Keuangan Negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Pemerintah.

Sebagai bentuk pengelolaan inovasi dan dalam rangka mewujudkan budaya inovasi di lingkungan BPPK, telah dilaksanakan kick off Festival Inovasi BPPK Tahun 2022 oleh Kepala BPPK Andin Hadiyanto. Penyampaian Proposal pada Liga Inovasi BPPK dilaksanakan sejak 26 Oktober-25 November 2022 dan terkumpul sebanyak 34 inovasi unit serta 63 ide inovasi.

Pada bulan ini dilaksanakan

*Town Hall Meeting* ketiga pada 27 September 2022 dengan tema "Ciptakan Inovasi, BPPK Berprestasi".

## 3 Oktober 2022

PKN STAN mewisuda 2.397 orang di kampus PKN STAN. Wisuda akbar ini dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Ketua IKANAS, serta jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan.

"Di dalam dunia kerja, setiap hari adalah ujian. Setiap hari juga adalah belajar. Siapkan mental kalian untuk menjadi bagian dari para birokrat di Indonesia yang memiliki ciri profesional, kompeten, bersinergi, untuk melayani, dan terus mengejar kesempurnaan," pesan Menteri Keuangan pada para wisudawan.

## 15-17 November 2022

*High Level Meeting* (HLM) merupakan pertemuan tahunan antara pimpinan tinggi BPPK dan DJKN dengan JPPH (Malaysia). HLM antara BPPK dan DJKN dengan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Malaysia pada tahun 2022 diselenggarakan oleh JPPH di Kuala Lumpur, Malaysia, di Hotel *Intercontinental* Kuala Lumpur Malaysia. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa perwakilan BPPK di antaranya



Kepala BPPK Andin Hadiyanto, Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Heru Wibowo, Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto, dan beberapa pejabat lainnya di lingkungan BPPK.

### **15 Desember 2022**

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan *Conference on Public Finance And Treasury 2022* dengan tema: *"Digital Transformation: Towards Inclusive Public Financial Management and Public Services"*. Kegiatan ini dihadiri Menteri Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, Kepala BPPK, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Staf Ahli Bidang OBTI, dan

Prof Miriam Lips dari *Victoria University of Wellington's School of Government*.

Untuk kedua kalinya, BPPK kembali menyelenggarakan Forum Koordinasi Pembelajaran Keuangan Negara bersama BPSDM Provinsi seluruh Indonesia.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan salah satu kegiatan prioritas yang menjadi indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Untuk mempersiapkannya, pegawai DJP perlu dibekali dengan pelatihan. Tercatat pada tahun 2022 telah rilis sebanyak 6 program *microlearning digital mindset* dan 12 e-learning proses bisnis terkait PSIAP yang digawangi Pusdiklat Pajak melalui Kemenkeu *Learning Center (KLC)* dan telah diikuti oleh seluruh pegawai DJP.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Pendapatan Negara sebesar Rp2.626,42 triliun (115,90 persen dari Perpres 98/2022 (Target)) atau tumbuh 30,58 persen (*yoy*). Realisasi pendapatan negara terdiri atas, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.716,76 triliun (115,61 persen dari Target) atau meningkat signifikan 34,27 persen (*yoy*), dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,78 triliun (106,27 persen dari target), meningkat 18,04 persen (*yoy*).



Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp588,34 triliun atau 122,16 persen dari Target. Capaian tersebut meningkat 28,32 persen (*yoy*).

Penerimaan hibah Rp3,54 triliun.



Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp2.274,52 triliun (98,82 persen dari Pagu), dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,69 persen (*yoy*).

Realisasi tersebut terdiri dari Realsasi Belanja K/L mencapai Rp1.079,30 triliun atau 114,12 persen dari Pagu dan Realiasi Belanja non K/L Rp1.195,22 triliun (88,15 persen dari Pagu), meningkat 47,58 persen (*yoy*).



Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp816,24 triliun atau 101,42 persen dari Pagu, meningkat 3,89 persen (*yoy*).

\*Angka realisasi bersifat sementara. Angka realiasi final menunggu hasil audit LKPP Tahun 2022.

# Ringkasan Eksekutif

## **P**rospek ekonomi global melemah didorong oleh tekanan likuiditas global

**sebagai respons atas tekanan inflasi.** Lembaga-lembaga internasional telah merevisi kebawah *outlook* pertumbuhan ekonomi global untuk 2022 dan 2023. Perkembangan aktivitas industri manufaktur global di Desember 2022 melanjutkan kontraksi dan mencapai level terendah dalam dua tahun terakhir. Potensi kenaikan tingkat bunga di negara maju masih cukup besar yang akan menekan likuiditas global. Dengan penurunan prospek ekonomi global dan perbaikan sisi suplai mendorong tren penurunan harga komoditas, terutama komoditas energi. Perekonomian nasional relatif masih *resilient*, namun perlu kewaspadaan dalam

menghadapi perkembangan tekanan global selanjutnya. Kinerja APBN yang positif pada tahun 2022 akan memberikan pondasi kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan pelaksanaan pembangunan nasional.

**Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Desember 2022 tercatat mencapai Rp2.626,42 triliun atau 115,90 persen terhadap Target. Persentase terhadap Target dan Pagu mengacu pada APBN Perpres 98/2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp615,08 triliun dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif Pendapatan Negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya 30,58 persen (yoy).** Secara nominal, realisasi komponen

pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp2.034,54 triliun, PNPB Rp588,34 triliun, dan Hibah Rp3,54 triliun. Berdasarkan kinerja pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNPB tumbuh masing-masing sebesar 31,44 persen (*yoy*) dan 28,32 persen (*yoy*), sedangkan penerimaan Hibah mengalami kontraksi sebesar 29,34 persen (*yoy*). Lebih lanjut, capaian penerimaan Perpajakan, PNPB, dan Hibah terhadap Target masing-masing 114,04 persen, 122,16 persen, dan 610,79 persen.

**Penerimaan Perpajakan terdiri dari penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir Desember 2022, realisasi penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak sebesar Rp1.716,76 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp317,78 triliun.** Kinerja kedua komponen penerimaan perpajakan tersebut masih cukup kuat yang terlihat dari pertumbuhannya masih *double digits* di mana penerimaan Pajak tumbuh 34,27 persen (*yoy*) dan Kepabeanan dan Cukai tumbuh 18,04 persen (*yoy*). Penerimaan Pajak dan

Kepabeanan dan Cukai telah melampaui Target dengan capaian berturut-turut 115,61 persen dan 106,27 persen.

**Kinerja penerimaan Pajak didukung terutama oleh penerimaan PPh Nonmigas dan PPN serta PPnBM, dimana masing-masing realisasinya Rp920,37 triliun atau tumbuh 42,95 persen (*yoy*) dan Rp687,59 triliun atau tumbuh 24,59 persen (*yoy*).** Realisasi PPh Nonmigas ditopang oleh capaian dari empat komponen penerimaan terbesarnya yang kontribusinya lebih dari 80 persen terhadap total penerimaan PPh Nonmigas yaitu berturut-turut PPh Pasal 25/29 Badan (Rp340,81 triliun), PPh Pasal 21 (Rp174,38 triliun), PPh Final (Rp166,57 triliun), dan PPh Pasal 22 Impor (Rp74,20 triliun). Kinerja empat komponen terbesar penerimaan PPh Nonmigas tersebut tumbuh berturut-turut 71,72 persen (*yoy*), 16,34 persen (*yoy*), 50,63 persen (*yoy*), dan 83,33 persen (*yoy*). Kinerja penerimaan PPh Nonmigas yang tinggi merupakan hasil dari semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan utilisasi serta upah tenaga kerja. Kinerja

PPH Nonmigas juga didorong oleh faktor meningkatnya profitabilitas perusahaan di tahun 2021 dan tren kenaikan harga komoditas yang masih terjadi hingga Triwulan IV 2022. Kinerja positif PPh Nonmigas juga didukung oleh dampak kebijakan diantaranya *tapering* relaksasi angsuran PPh Pasal 25 dan dampak penerimaan PPS. Selanjutnya, capaian penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM masih ditopang oleh PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Hingga akhir Desember 2022, penerimaan PPN DN tumbuh 13,69 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp390,27 triliun yang didorong oleh perluasan basis pajak dan kenaikan aktivitas ekonomi yang tumbuh sejalan dengan perkembangan perekonomian. Selain itu, kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen sejak 1 April 2022 mulai berdampak pada bertambahnya penerimaan PPN DN. Lebih lanjut, kinerja PPN Impor tumbuh signifikan sebesar 41,37 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp270,71 triliun seiring peningkatan aktivitas impor.

**Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal**

**terdiri dari penerimaan Cukai Rp226,88 triliun, Bea Masuk (BM) Rp51,08 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp39,82 triliun. Kinerja seluruh komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai tersebut tumbuh *double digits*, yaitu berturut-turut 16,04 persen (yoy), 30,56 persen (yoy), dan 15,18 persen (yoy).**

Penerimaan Cukai didukung oleh penerimaan komponen Cukai HT dan Cukai MMEA. Kinerja CHT dipengaruhi oleh dampak kebijakan penyesuaian tarif cukai serta program pengawasan melalui pemberantasan cukai rokok ilegal, sementara MMEA didorong oleh adanya relaksasi daerah wisata dengan membaiknya pandemi. Pada komponen Perdagangan Internasional, BM realisasinya terus tumbuh positif didorong oleh semakin membaiknya perekonomian nasional karena produksi dan konsumsi dalam negeri yang meningkat. Sedangkan BK didukung oleh faktor peningkatan harga komoditas dan volume ekspor komoditas utama Indonesia seperti CPO dan turunannya, serta mineral tembaga.

**Realisasi sementara PNBP selama tahun 2022 mencapai Rp588,34 triliun (122,16**

**persen dari Target, atau tumbuh positif 28,32 persen (yoy).** Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), PNBPN Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), dan PNBPN Lainnya.

Secara lebih rinci, realisasi PNBPN SDA mencapai Rp268,67 triliun atau tumbuh positif sebesar 79,73 persen (yoy). Tumbuh positifnya PNBPN SDA utamanya didorong oleh kenaikan ICP dan harga komoditas minerba, terutama batubara. Sejalan dengan PNBPN SDA, PNBPN yang berasal dari KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp40,60 triliun atau tumbuh positif 33,12 persen (yoy). Capaian positif PNBPN KND utamanya didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN, terutama sektor perbankan. Selanjutnya dari sisi PNBPN Lainnya, realisasi hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp196,25 triliun atau tumbuh positif sebesar 28,69 persen (yoy). Meningkatnya capaian PNBPN Lainnya antara lain disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT) Batubara, pendapatan DMO serta PNBPN Layanan K/L a.l visa, paspor, perijinan, dan layanan kepolisian. Sedangkan di sisi lain, PNBPN yang

bersumber dari pendapatan BLU masih mengalami pertumbuhan negatif, tercatat hingga akhir tahun 2022 capaian realisasinya sebesar Rp82,82 triliun atau tumbuh negatif sebesar 34,27 persen (yoy). Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU disebabkan oleh penurunan pendapatan BLU perkebunan kelapa sawit sebagai dampak larangan ekspor CPO dan kebijakan tarif pungutan ekspor CPO.

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp3.090,75 triliun (99.5 persen dari Pagu, dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,90 persen (yoy)).**

Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.274,52 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp816,24 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 13,7 persen (yoy) terutama dipengaruhi meningkatnya realisasi belanja subsidi yang tumbuh 4,43 persen (yoy) untuk menjaga ketersediaan barang bersubsidi yang terjangkau masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas. Realisasi belanja pegawai hingga akhir tahun 2022 mengalami pertumbuhan



positif, dengan realisasinya mencapai Rp402,04 triliun atau tumbuh 3,70 persen (yoy).

Di sisi lain, realisasi belanja barang mengalami kontraksi 20,18 persen (yoy) dipengaruhi menurunnya belanja barang yang terkait penanganan Covid-19 seiring dengan perkembangan kondisi pandemi yang semakin terkendali. Realisasi belanja modal sudah mencapai Rp238,85 triliun dan secara nominal lebih tinggi dari level pre-pandemi, antara lain pemanfaatannya untuk dukungan pengadaan/modernisasi peralatan pada Kemenhan dan POLRI, serta pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan dan bendungan pada Kementerian PUPR. Sementara itu, realisasi Bantuan Sosial hingga akhir tahun 2022 telah mencapai Rp161,03 triliun atau mencapai 109,23 persen dari Pagu antara lain untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM serta BLT BBM bagi 20,7 juta KPM.

**Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp252,81 triliun atau 89,13 persen dari Pagu, atau**

**meningkat 4,43 persen (yoy).**

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi sebesar Rp171,86 triliun (naik 22,41 persen yoy) dan subsidi nonenergi sebesar Rp80,95 triliun (turun 20,39 persen yoy).

**Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp115,61 triliun atau 77,40 persen dari Pagu, atau meningkat 37,99 persen (yoy).**

Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg utamanya dipengaruhi kenaikan ICP yang rata-rata naik sebesar 41,71 persen (yoy) selama periode Januari-Desember 2022. Selain itu, hingga akhir tahun 2022, juga terjadi kenaikan volume LPG sebesar 2,94 persen (yoy). Pada tahun 2021, realisasi volume LPG Tabung 3 Kg sebesar 7,12 juta MT, sedangkan pada tahun 2022 periode yang sama mencapai 7,33 juta MT. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,24 triliun atau 94,43 persen dari Pagu. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 0,64 persen.

**Sementara itu, realisasi belanja subsidi nonenergi pada Januari-Desember 2022 yang sebesar Rp80,95 triliun, atau 108,33 persen dari Pagu,**

didominasi oleh subsidi pupuk sebesar Rp29,77 triliun atau 36,77 persen dari total realisasi subsidi nonenergi, sedangkan realisasi subsidi kredit program tercatat sebesar Rp29,14 triliun atau berkontribusi kedua terbesar terhadap realisasi subsidi nonenergi yaitu 36,00 persen. Meskipun demikian, secara keseluruhan realisasi subsidi nonenergi mengalami penurunan sebesar 20,39 persen (yoy). Penurunan ini diantaranya dipengaruhi oleh turunnya realisasi subsidi pajak sebesar 39,16 persen (yoy), subsidi kredit program juga mengalami penurunan sebesar 41,83 persen (yoy). Sementara itu, meskipun realisasi subsidi pupuk tumbuh positif sebesar 9,63 persen (yoy) namun jika dilihat dari sisi penyaluran volume pupuk bersubsidi justru terjadi penurunan penyaluran selama periode Januari-Desember yaitu dari sebanyak 7,92 juta ton pada 2021 mengalami penurunan menjadi 7,40 juta ton pada 2022 atau mengalami penurunan sebanyak 6,58 persen. Selain itu, pupuk organik cair juga mengalami penurunan volume penyaluran dari tersalur

sebanyak 213,45 ribu liter pada tahun 2021 menjadi tersalur hanya 67,96 ribu liter pada 2022 atau mengalami penurunan signifikan sebesar 68,16 persen (yoy).

**Penyaluran TKD sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp816,24 triliun atau 101,42 persen dari Pagu yang terdiri dari TKD sebesar Rp748,33 triliun (101,57 persen Pagu) dan Dana Desa Rp67,91 triliun (99,86 persen Pagu). Penyaluran TKD tersebut lebih tinggi Rp30,53 triliun atau meningkat 3,89 persen (yoy). Secara umum, peningkatan penyaluran TKD didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp168,41 triliun (119,93 persen dari Pagu) atau tumbuh signifikan 43,75 persen (yoy) atau naik Rp51,26 triliun seiring dengan penyaluran Kurang Bayar DBH s.d. TA 2021 dan penyesuaian pagu DBH sesuai dengan realisasi pendapatan.**

Penyaluran TKD sampai dengan akhir tahun 2022 lebih tinggi Rp34,48 triliun atau

meningkat sebesar 4,83 persen (yoy). Pertumbuhan penyaluran TKD dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan Pemda dalam memenuhi syarat salur. Selain DBH, jenis TKD yang mendalami peningkatan adalah: (i) penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai Rp378,00 triliun, lebih tinggi Rp0,21 triliun (0,06 persen yoy), dan (ii) penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan (Dais) DIY mencapai Rp21,76 triliun, lebih tinggi Rp0,95 triliun (4,58 persen yoy). DAU, Dana Otsus, dan Dais DIY telah tersalurkan sebesar 100 persen dari Pagu.

Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Insentif Daerah (DID) tumbuh negatif dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Penyaluran DAK Fisik mencapai Rp54,78 triliun atau lebih rendah Rp2,29 triliun, minus 4,01 persen (yoy) karena Pagu tahun 2022 yang lebih rendah 4,36 persen yoy. DAK Nonfisik mencapai Rp118,38 triliun atau lebih rendah Rp9,19 triliun, minus 7,20 persen (yoy) sejalan dengan adanya optimalisasi sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020

dan 2021 yang masih terdapat di rekening sekolah, pada penyaluran tahap 2 dan tahap 3. Penyaluran DID mencapai Rp6,99 triliun atau lebih rendah Rp6,47triliun, minus 48,06 persen (yoy) disebabkan pagu DID tahun 2022 yang lebih rendah 48,15 persen (yoy). Sementara itu, penyaluran Dana Desa mencapai Rp67,91 triliun atau lebih rendah Rp3,95 triliun, minus 5,49 persen (yoy).

**Berdasarkan realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga akhir Desember 2022, terdapat defisit anggaran sebesar negatif Rp464,33 triliun atau sekitar negatif 2,38 persen terhadap PDB .** Sementara

itu, realisasi sementara Pembiayaan Anggaran hingga akhir Desember 2022 ini mencapai Rp583,54 triliun atau 69,45 persen terhadap Pagu. Realisasi sementara Pembiayaan Utang sampai akhir Desember 2022 mencapai Rp688,54 triliun atau 72,96 persen terhadap Pagu. Realisasi tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp658,82 triliun dan Pinjaman (Neto)

sebesar Rp29,72 triliun. Selain Pembiayaan Utang, Pemerintah juga merealisasikan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp106,81 triliun. Pemberian Pinjaman sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebesar Rp2,30 triliun dan Pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar Rp667,10 miliar untuk Pembiayaan Lainnya serta mengalokasikan Kewajiban Penjaminan sebesar negatif Rp1,13 triliun.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Perkembangan  
Ekonomi Makro



# Perkembangan Ekonomi Makro

**D**i tengah tekanan situasi global, aktivitas ekonomi nasional masih kuat dan pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM seiring penanganan kasus Covid-19 yang terkendali. Di akhir kuartal IV 2022, beberapa indikator ekonomi masih menunjukkan kinerja yang positif. *Purchasing Managers' Index* (PMI) sektor manufaktur nasional masih berada pada level ekspansi dan meningkat dibandingkan bulan

sebelumnya. *Mandiri Spending Index* meningkat di Desember 2022 yang menggambarkan aktivitas belanja masyarakat yang meningkat. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen yang juga masih terjaga, memperkuat optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi kedepan.

Stabilitas pasar keuangan nasional masih terjaga ditengah tekanan akibat tekanan likuiditas keuangan

global. Tekanan kondisi keuangan global terhadap pasar keuangan nasional selama tahun 2022 relatif moderat karena adanya fundamental dan pengelolaan ekonomi nasional yang kuat. Pasar saham domestik masih cukup kuat meskipun melemah dan IHSG tercatat 6.850,62 pada 30 Desember 2022. Memasuki tahun 2023, pergerakan IHSG masih cenderung meningkat dan pada 11 Januari 2023 tercatat sebesar 6.584. Nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp15.731 per USD pada 30 Desember 2022, mengalami depresiasi relatif rendah sebesar 9,3 persen dibandingkan levelnya di awal tahun 2022. Sehingga, rata-rata nilai tukar Rupiah selama 2022 adalah sebesar Rp14.871 per USD. Memasuki tahun 2023, pergerakan nilai tukar rupiah masih cenderung menguat dan tercatat sebesar Rp15.527 per USD per 11 Januari 2023. Tekanan terhadap inflasi lebih moderat dibandingkan perkiraan dan pada Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 0,66 persen (*mtm*) didorong oleh faktor musiman. Sehingga, Inflasi pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,51 persen (*yoy*). Posisi

cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tercatat sebesar USD137,2 miliar.

Aktivitas pariwisata nasional terus mengalami perkembangan positif yang ditunjukkan dengan peningkatan secara pesat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (*wisman*) ke dalam negeri. Aktivitas sektor pariwisata yang meningkat ini berpengaruh positif terhadap aktivitas sektor pendukung lainnya seperti industri makanan dan minuman, hotel, transportasi, serta perdagangan. Kunjungan *wisman* ke Indonesia pada November 2022 meningkat lebih 3 kali lipat mencapai 657,27 ribu kunjungan, dibandingkan dengan kunjungan November 2021 yang hanya tercatat sebesar 150,58 ribu kunjungan. Hingga November 2022, jumlah kunjungan *wisman* ke Indonesia melalui pintu masuk utama mencapai 4,57 juta kunjungan, meningkat tajam dibandingkan kunjungan *wisman* periode yang sama di 2021 yang hanya tercatat sebesar 1,39 juta kunjungan. Sementara itu, aktivitas



industri perhotelan juga memperlihatkan peningkatan dibandingkan kondisi tahun lalu. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia mencapai 54,41 persen pada November 2022, naik sebesar 6,58 poin dibandingkan kondisi November 2021.

Realisasi APBN



# Realisasi APBN Tahun 2022

**A** PBN 2022: Telah bekerja keras sebagai *shock absorber* dalam melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga APBN disiapkan untuk melanjutkan dukungan terhadap program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Berbagai

kebijakan fiskal diwujudkan melalui dukungan vaksinasi, penyediaan alat medis dan pemberian obat-obatan, perawatan pasien, perlindungan sosial bagi masyarakat, serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* dalam meredam gejolak perekonomian global. Upaya-upaya tersebut diselaraskan dengan langkah konsolidasi fiskal sebagai

komitmen Pemerintah untuk menyetujui APBN itu sendiri .

Di tengah risiko volatilitas lingkungan global, perekonomian nasional mampu melanjutkan pemulihan yang semakin kuat. Membaiknya aktivitas ekonomi tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan efektivitas kebijakan fiskal dan APBN 2022 dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi. Perekonomian di tahun 2022 pada triwulan III tumbuh kuat 5,72 persen (yoy) atau secara kumulatif s.d. Triwulan III 2022 tumbuh 5,40 persen sejalan dengan ekspansi perekonomian domestik yang terus berlanjut dan dukungan sektor eksternal yang mencatatkan surplus dalam 31 bulan terakhir. Bauran kebijakan fiskal maupun moneter serta sektor keuangan mampu menjaga stabilitas makro ekonomi dengan baik. Peran *shock absorber* APBN juga mampu mengendalikan tekanan inflasi domestik sekaligus menjaga daya beli masyarakat meskipun dihadapkan pada tekanan harga komoditas dunia.

Selain mampu menjalankan fungsinya secara efektif, pelaksanaan APBN tahun 2022 mencatatkan kinerja positif sejalan perekonomian domestik yang membaik dan semakin terkendalinya pandemi Covid-19. APBN tahun 2022 menjadi instrumen dalam mendukung pencapaian sasaran target pembangunan, meredam dampak gejolak ekonomi global, dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat. Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2022 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat dengan realisasi defisit sebesar 2,38 persen PDB, lebih cepat satu tahun dalam pencapaian defisit maksimal 3 persen dari PDB sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020.

Selama tahun 2022, APBN berhasil menjadi instrumen stabilisasi (*shock absorber*) dalam melindungi masyarakat, mendukung gerak dunia usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerja keras APBN tersebut diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara yang tumbuh 10,92 persen dari tahun 2021 dan sekitar 99,55 persen dari Pagu untuk mendukung

peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Dalam rangka melindungi daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian, Pemerintah memberikan berbagai subsidi nonenergi, subsidi energi, dan kompensasi kepada masyarakat dan dunia usaha.

Kinerja APBN yang baik di tahun 2022 dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi modal kuat bagi APBN dalam menjalankan fungsinya di tengah ketidakpastian ekonomi di tahun 2023. Rincian pelaksanaan APBN tahun 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut.

### **Kinerja Ekonomi Makro**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai targetnya pada kisaran 5,1-5,3 persen meskipun di tengah dinamika perekonomian global yang sangat *volatile*. Hal ini sejalan dengan tren penguatan pemulihan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen dalam 3 kuartal pertama tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama

didorong oleh tingkat konsumsi domestik yang stabil serta kinerja positif perdagangan internasional Indonesia yang mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 31 bulan terakhir.

Tingkat inflasi domestik tahun 2022 bergerak moderat dan tetap terkendali di tengah tekanan lonjakan inflasi dunia akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi. Inflasi Indonesia mencapai 5,51 persen didukung oleh kebijakan stabilisasi serta berfungsinya peran APBN sebagai *shock absorber*. Keberhasilan dalam menjaga *supply* dan distribusi kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk dari subsidi dan kompensasi energi dan pangan berperan dalam menjaga tingkat inflasi terutama inflasi harga pangan.

Rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) pada tahun 2022 mencapai USD97 per barel. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh eskalasi konflik geopolitik yang menyebabkan terjadinya gangguan rantai *supply* komoditas energi dan pangan dunia. Namun, tren ICP cenderung mengalami penurunan seiring dengan

proyeksi perlambatan perekonomian dunia yang berpengaruh terhadap penurunan harga minyak dunia.

### **Kinerja Pelaksanaan APBN**

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,42 triliun (115,90 persen dari Target) atau tumbuh 30,8 persen (yoy). Realisasi pendapatan negara terdiri atas, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,54 triliun (114,04 persen dari Target), PNBPNP Rp588,34 triliun (122,16 persen dari Target), dan penerimaan hibah Rp3,54 triliun.

Capaian realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.716,76 triliun (115,61 persen dari target) atau meningkat signifikan sebesar 34,27 persen (yoy). Capaian penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan permintaan yang terus membaik, tren peningkatan harga komoditas, serta dampak implementasi kebijakan UU HPP (PPS/PPS dan implementasi tarif baru PPN).

Sedangkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp317,78 triliun (106,27 persen dari Target), meningkat 18,04 persen (yoy). Capaian penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut terutama ditopang oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau/CHT serta meningkatnya cukai minuman mengandung etil alkohol/MMEA seiring membaiknya sektor pariwisata, kenaikan harga komoditas utama ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri terkait barang impor.

Realisasi PNBPNP mencapai Rp588,34 triliun atau 122,16 persen dari Target. Capaian tersebut meningkat 28,32 persen (yoy). Peningkatan penerimaan PNBPNP tersebut didukung oleh meningkatnya harga komoditas (minyak mentah dan minerba), serta membaiknya layanan PNBPNP K/L seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat.

Realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,75 triliun atau meningkat 10,92 persen (yoy), sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang berperan sebagai *shock absorber* untuk melindungi perekonomian dan

masyarakat terhadap dampak risiko ketidakpastian global. Penyerapan belanja negara tersebut mencapai 99,50 persen dari Pagu.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.274,52 triliun (98,82 persen dari Target) atau meningkat 13,69 persen (yoy). Jumlah tersebut terdiri dari realisasi belanja K/L sebesar Rp1.079,30 triliun (114,12 persen dari Pagu). Realisasi belanja K/L tersebut dipengaruhi antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan Covid-19 dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/vaksin penanganan Covid-19. Tambahan belanja di bidang perlindungan sosial utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah.

Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.195,22 triliun (88,15 persen dari Pagu), meningkat 47,58 persen (yoy). Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai Rp386,34 triliun (95,19 persen dari Pagu), subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp551,18 triliun (109,70 persen dari Pagu) atau meningkat 192,72 persen (yoy). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan Listrik yang meningkat.

Realisasi anggaran TKD tahun 2022 mencapai Rp816,24 triliun (101,42 persen dari Pagu), meningkat 3,89 persen (yoy). Realisasi anggaran TKD tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta pelaksanaan program BLT Desa.

Pembiayaan anggaran tahun 2022 difokuskan Pemerintah untuk menutup defisit yang realisasinya mencapai Rp583,54 triliun atau 69,45 persen dari Pagu. Anggaran defisit utamanya

Tabel Realisasi Sementara APBN Tahun 2022 \*  
(triliun Rupiah)

URAIAN	2021	2022				
	Realisasi	APBN	Perpres 98/2022	Realisasi Sementara	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>2.011,35</b>	<b>1.846,14</b>	<b>2.266,20</b>	<b>2.626,42</b>	<b>115,90</b>	<b>30,58</b>
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.006,33	1.845,56	2.265,62	2.622,88	115,77	30,73
1. Penerimaan Perpajakan	1.547,84	1.510,00	1.783,99	2.034,54	114,04	31,44
2. PNBP	458,49	335,56	481,63	588,34	122,16	28,32
II. Penerimaan Hibah	5,01	0,58	0,58	3,54	610,84	(29,34)
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.786,41</b>	<b>2.714,16</b>	<b>3.106,43</b>	<b>3.090,75</b>	<b>99,50</b>	<b>10,92</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.000,70	1.944,54	2.301,64	2.274,52	98,82	13,69
1. Belanja K/L	1.190,81	945,75	945,75	1.079,30	114,12	(9,36)
2. Belanja Non K/L	809,89	998,79	1.355,89	1.195,22	88,15	47,58
II. Transfer Ke Daerah	785,71	769,61	804,78	816,24	101,42	3,89
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(431,57)</b>	<b>(462,15)</b>	<b>(434,36)</b>	<b>(77,99)</b>	<b>17,96</b>	<b>(81,93)</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(775,06)</b>	<b>(868,02)</b>	<b>(840,23)</b>	<b>(464,33)</b>	<b>55,26</b>	<b>(40,09)</b>
<i>% thd PDB</i>	<i>(4,57)</i>	<i>(4,85)</i>	<i>(4,50)</i>	<i>(2,38)</i>		
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>871,72</b>	<b>868,02</b>	<b>840,23</b>	<b>583,54</b>	<b>69,45</b>	<b>(33,06)</b>
<b>SiLPA/(SiKPA)</b>	<b>96,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>119,21</b>		

\*) Realisasi sementara menunggu audit LKPP 2022



untuk membiayai kegiatan dalam rangka keberlanjutan program penanganan pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu anggaran defisit juga berperan dalam mendukung kenaikan belanja negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat dalam rangka menghadapi ketidakpastian global. Realisasi pembiayaan utang di tahun 2022 mencapai Rp688,54 triliun atau 72,96 persen dari Pagu. Realisasi pembiayaan utang tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi sebesar Rp106,81 triliun.

Dengan defisit yang lebih rendah yang didukung oleh membaiknya pendapatan negara serta optimalisasi pembiayaan anggaran, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 sebesar Rp119,21 triliun. SiLPA tahun 2022 sangat penting untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian di tahun 2023.

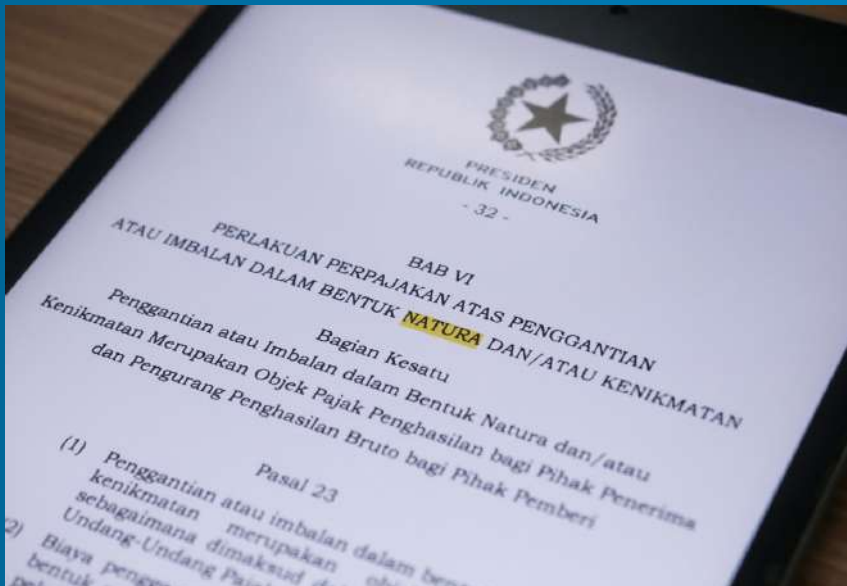
# Pengaturan Natura dan Kenikmatan untuk Pajak yang Berkeadilan

**A**tas penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak 1 Januari 2023, pemberi kerja atau pemberi imbalan wajib melakukan pemotongan PPh. Aturan ini tercantum dalam PP Nomor 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang UU HPP.

Dengan berlakunya UU HPP, perlakuan perpajakan atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan mengalami penyesuaian. Latar belakang penyesuaian ini karena imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak cenderung dinikmati oleh

*high level employee* (direktur, manajer, dan komisaris). Hal ini menimbulkan ketidakadilan apabila hanya golongan tertentu yang menerima imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan sebab biasanya penghasilan untuk pegawai berupa gaji/upah dikenai PPh. Selain itu, terdapat celah penghindaran pajak ketika pemberi kerja memanfaatkan tarif PPh Badan yang lebih kecil dari PPh Orang Pribadi dengan pemberian imbalan berupa natura dan/atau kenikmatan. Kondisi ini seharusnya dapat diminimalkan dengan memperkuat regulasi pajak yang berkeadilan.

Sebelumnya, menurut UU Nomor 36/2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7/1983 tentang PPh,



secara umum natura dan/atau kenikmatan bagi penerima/karyawan dikecualikan sebagai objek PPh (bersifat *non-taxable*), kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh.

Setelah UU HPP berlaku, pemberian natura dan/atau kenikmatan bagi penerima/karyawan merupakan objek PPh (*taxable*), kecuali: makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu meliputi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas di lokasi kerja untuk

pegawai dan keluarganya; natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDDesa; atau natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Bagi pemberi kerja sebelum UU HPP berlaku, pemberian natura dan/atau kenikmatan tidak dapat dibiayakan (*non-deductible*) kecuali natura dan/atau kenikmatan bagi seluruh pegawai serta penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan perusahaan. Setelah UU HPP berlaku, biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dapat dikurangkan (*deductible*) dari

penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

### **Dasar Penilaian Penggantian**

Berdasarkan penjelasan PP Nomor 55/2022, yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Termasuk dalam pengertian uang antara lain cek, saldo tabungan, uang elektronik, atau saldo dompet digital. Natura dialihkan dari pemberi kepada penerima sebagai bentuk dari penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Sementara itu, yang dimaksud dengan imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan. Fasilitas dan/atau pelayanan yang diberikan pemberi kepada penerima dapat bersumber dari aktiva pemberi atau aktiva pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi.

Menurut PP Nomor 55/2022, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa dinilai dengan ketentuan: untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, yaitu berdasarkan nilai pasar; sedangkan untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan, yaitu berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi.

Ketentuan mengenai perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 PP Nomor 55/2022, yaitu bagi pemberi kerja yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Sedangkan bagi pemberi kerja yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya, mulai berlaku pada saat tahun buku 2022 dimaksud dimulai.

Atas penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau

imbalan; atau awal tahun buku 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yang belum dilakukan pemotongan PPh oleh pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan atas PPh yang terutang wajib dihitung dan dibayar sendiri serta dilaporkan oleh penerima dalam SPT PPh Tahun Pajak 2022.

Kewajiban menghitung dan membayar sendiri natura dan/atau kenikmatan yang diterima dan belum dilakukan pemotongan tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi wajib pajak, sebab batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi orang pribadi adalah 31 Maret 2023. Pemahaman terhadap natura dan/atau kenikmatan mana saja yang menjadi objek pajak serta nilai penggantian yang digunakan dalam menghitung penghasilan akan menentukan nilai pajak yang perlu dibayarkan.

# Sinergi Bea Cukai dan Polri Gagalkan Penyelundupan 50 Kg Sabu-Sabu Jaringan Malaysia – Indonesia

**J**akarta, Sinergi Bea Cukai dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam mengamankan wilayah Indonesia dari peredaran gelap narkoba kembali membuahkan hasil. Kolaborasi penindakan antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim POLRI dengan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Aceh dan Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba jaringan Malaysia – Indonesia yang diselundupkan melalui perairan Aceh dan Sumatra Utara.

“Penangkapan berawal dari informasi Ditipidnarkoba Bareskrim POLRI tentang rencana masuknya narkoba jenis sabu-sabu dari

Malaysia menuju perairan Aceh. Kemudian, Tim Ditipidnarkoba Bareskrim POLRI, Ditresnarkoba Polda Aceh, dan Bea Cukai Belawan melakukan patroli laut di perairan yang dicurigai,” ujar R. Syarif Hidayat, Direktur Interdiksi Narkoba Bea Cukai, dalam Konferensi Pers yang digelar Ditipidnarkoba Bareskrim POLRI pada Selasa (10/01/2023).

Syarif mengatakan bahwa setelah melakukan penelusuran, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang tersangka berinisial I, ES, dan F sebagai kurir darat yang membawa 50 kg sabu-sabu dalam sebuah mobil, di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, pada Rabu (04/01/2023). Tidak jauh dari lokasi penangkapan, tim



berhasil menangkap tersangka lain berinisial B, S alias Sadek, dan J alias Bulat yang bertugas sebagai sebagai kurir laut.

“Berdasarkan interograsi tiga tersangka yang bertugas sebagai kurir darat, mereka diperintahkan oleh seseorang yang disebut Mr. X untuk menjemput sabu-sabu yang dibawa oleh kurir laut. Setelah dikembangkan, tim berhasil menangkap tersangka berinisial U di Lhokseumawe yang berperan sebagai pencari tekong dan pencari boat. Tim juga berhasil menangkap tersangka berinisial R yang bertugas mengambil barang di sebuah café di Medan atas perintah HS dan Z yang merupakan tahanan Lapas Tanjung Gusta,” jelas Syarif.

Tim berhasil mengamankan

barang bukti berupa sabu-sabu sejumlah 50 kg yang dibungkus dengan kemasan teh cina pada tiga bungkus kantong plastik, 1 unit mobil warna abu-abu, 1 unit boat oskadon, dan sejumlah alat komunikasi. Tim juga berhasil mengamankan sebanyak 10 orang tersangka dengan rincian 3 orang sebagai kurir darat, 3 orang sebagai kurir laut, 1 orang sebagai pencari boat, 1 orang sebagai kurir yang akan menerima barang, dan 2 orang yang telah berstatus sebagai narapidana. Sementara seseorang yang disebut sebagai Mr. X masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Atas penindakan tersebut, pelaku melanggar pasal 114 ayat 2 j.o. pasal 132 ayat 2 UU

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda minimal senilai satu miliar rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah ditambah sepertiga.

Syarif mengatakan bahwa seluruh barang bukti dan tersangka telah diamankan oleh POLRI untuk proses penyidikan lebih lanjut. "Sebagai *community protector*, Bea Cukai terus berupaya menekan peredaran jaringan narkotika untuk melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Sinergi Bea Cukai dan Polri merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman narkotika," pungkasnya.





Menutup Tahun  
2022, Penerimaan  
Pajak Tembus  
115,61 Persen dari  
Target Perpres 98  
Tahun 2022

# Penerimaan Perpajakan

**K**onsisten sejak tahun 2021, DJP kembali menorehkan sejarah dengan tercapainya target penerimaan. Kinerja penerimaan pajak sampai dengan tutup tahun 2022 mencapai Rp1.716,76 triliun atau 115,61 persen dari target. Realisasi yang apik pada tahun 2022 ini menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Senada dengan realisasi penerimaannya, pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2022 juga menjadi pertumbuhan dengan

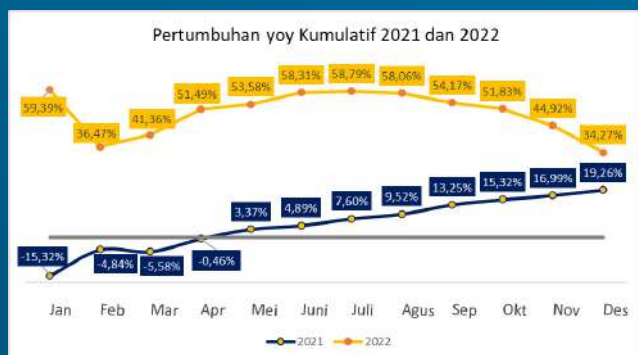
performa terbaik sejak tahun 2019. Secara lebih presisi capaian pertumbuhan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 34,27 persen (yoy), dengan melanjutkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun sebelumnya yang juga memuaskan dengan capaian 19,26 persen (yoy).

Tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2022 merupakan refleksi dari pemulihan ekonomi yang merata pada berbagai sektor di penjuru Indonesia. Selain

### Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak 2019 sampai dengan 2022



### Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2021 dan 2022



### Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022

Uraian	Target Perpres 98 2022 (Triliun)	Realisasi s.d 31 Desember 2022		
		Rp (Triliun)	Δ% '21-'22	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	813,68	998,22	43,28	122,68
- Non Migas	749,02	920,37	42,95	122,88
- Migas	64,66	77,84	47,32	120,39
PPN & PPnBM	638,99	687,59	24,59	107,61
PBB dan Pajak Lainnya	32,29	30,95	2,99	95,87
<b>Jumlah</b>	<b>1.484,96</b>	<b>1.716,76</b>	<b>34,27</b>	<b>115,61</b>

dari pemulihan ekonomi, penerimaan pajak yang menggembirakan merupakan wujud kerja keras dari unit vertikal DJP. Pada tahun 2022, seluruh Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhasil mencapai target 100 persen penerimaannya, jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya yang hanya 16 Kanwil DJP dan 209 KPP yang berhasil mencapai target. Selain kabar baik tersebut, mayoritas KPP dan Kanwil DJP pada tahun 2022 ini berhasil mencapai target penerimaan diatas 120 persen.

Sampai dengan berakhirnya tahun 2022, seluruh kelompok pajak berhasil mencapai target penerimaannya, kecuali pada kelompok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya. Penerimaan dari PPh Non Migas berhasil mencapai target sejak bulan Oktober 2022, dan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp920,37 triliun atau tumbuh 42,95 persen (yoy). Senada dengan PPh Non Migas, kinerja PPh Migas juga tumbuh positif dengan capaian Rp77,84 triliun atau tumbuh 47,32 persen (yoy). Selanjutnya, penerimaan dari PBB dan Pajak Lainnya

membukukan realisasi Rp30,95 triliun atau tumbuh 2,99 persen (yoy). Sedangkan kinerja pajak atas konsumsi yaitu PPN dan PPnBM tumbuh 24,59 persen (yoy) atau mencapai 107,61 persen dari Target.

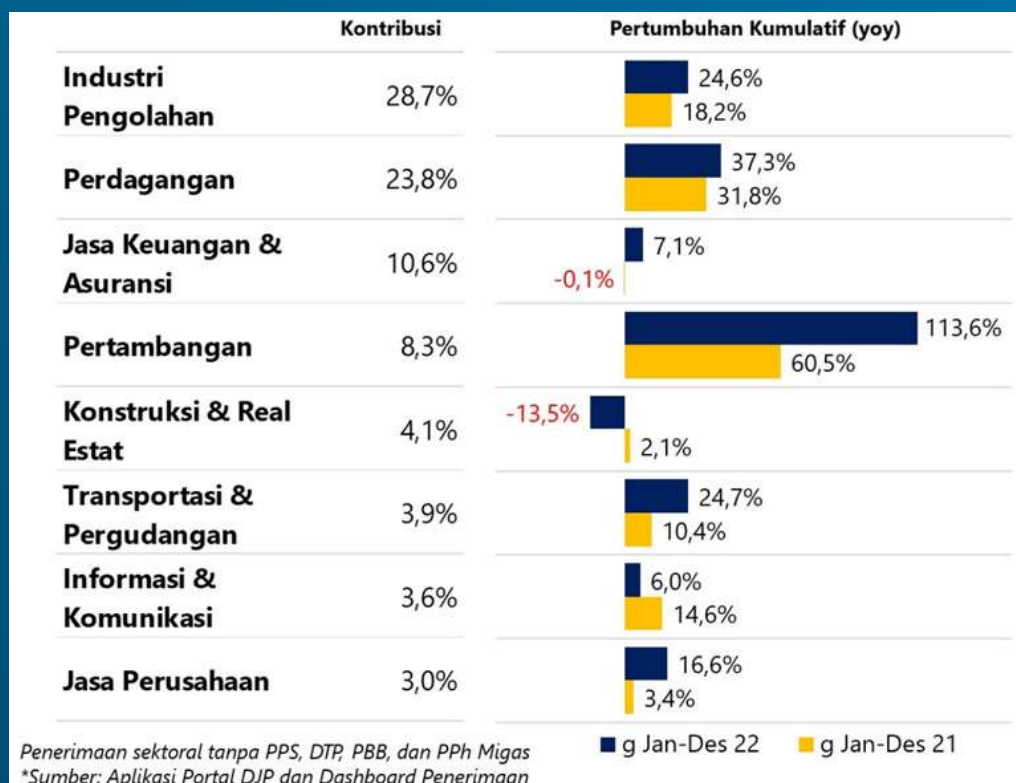
### **Kinerja Per Jenis Pajak, Mayoritas Jenis Pajak Utama Tumbuh Positif**

Sampai dengan penghujung tahun 2022, hampir seluruh jenis pajak membukukan pertumbuhan yang menggembirakan. Bila diurutkan berdasarkan besaran kontribusinya, PPN DN sebagai kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak, tumbuh 13,69 persen (yoy) sampai dengan akhir tahun 2022. Kinerja dari PPN DN pada periode ini merupakan andil dari peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ekspansif, penyesuaian tarif PPN DN, dan perluasan basis pajak. Selaras dengan PPN DN, pajak atas korporasi yaitu PPh Badan juga tumbuh kuat mencapai 71,72 persen (yoy). Selanjutnya, Jenis Pajak dengan kontribusi terbesar ketiga, yaitu PPN Impor, mampu mengalami peningkatan pertumbuhan mencapai 41,37 persen (yoy).

## Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



## Penerimaan Pajak Sektoral



Kinerja dari PPN Impor yang tinggi merupakan dampak dari peningkatan aktivitas impor pada tahun 2022.

Berikutnya, jenis pajak yang merupakan hasil dari utilisasi tenaga kerja yaitu PPh Pasal 21 tumbuh secara kumulatif 16,34 persen (yoy). Jenis pajak ini berkontribusi mencapai 10,2 persen dari total penerimaan pajak keseluruhan. Sedangkan jenis pajak yang mendapatkan berkah dari PPS yaitu PPh Final, pada periode sampai dengan 31 Desember 2022 tumbuh mencapai 50,63 persen (yoy). Berikutnya, jenis pajak dengan kontribusi masing-masing diatas 4 persen yaitu PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 26, tumbuh 83,33 persen (yoy) dan 7,04 persen (yoy) secara berturut-turut. Terakhir, jenis pajak dengan kontribusi terkecil yaitu PPh Orang Pribadi (OP) masih tertekan karena adanya pergeseran pembayaran PPh OP ke PPh Final dampak dari implementasi PPS.

### **Kinerja Penerimaan Pajak Sektoral, Sektor-Sektor Utama Tumbuh Kuat**

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, penerimaan pajak secara kumulatif pada sektor-sektor utama masih tumbuh dengan capaian yang

memuaskan. Jika dijabarkan menurut peringkat terbesar kontribusinya, Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar tumbuh 24,61 persen (yoy). Begitu pula dengan Sektor Perdagangan yang juga tumbuh kuat mencapai 37,31 persen (yoy). Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan tumbuh impresif sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas. Selanjutnya, sektor dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 10,6 persen yaitu Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, tumbuh 7,09 persen (yoy). Baiknya capaian Sektor Keuangan ini ditopang oleh peningkatan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan bank.

Selanjutnya, Sektor Pertambangan pada tahun 2022 menjadi sektor dengan pertumbuhan yang luar biasa. Sampai dengan akhir tahun 2022, Sektor Pertambangan tumbuh 113,57 persen (yoy). Tingginya penerimaan pajak pada sektor pertambangan merupakan dampak dari *global demand* yang tinggi atas komoditas tambang, dan melonjaknya harga komoditas tambang dunia. Berikutnya, Sektor Konstruksi dan *Real Estate* menjadi satu-satunya

sektor utama yang mengalami tekanan pada periode ini. Sektor Konstruksi dan *Real Estate* mengalami kontraksi karena penerapan PMK Nomor 58 dan 59 tahun 2022. Peraturan Menteri tersebut mengubah model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah, akibatnya terdapat pergeseran penerimaan pajak sektoral. Namun demikian, apabila mekanisme penerapan PMK Nomor 58 dan 59 tahun 2022 dikeluarkan dari Sektor Konstruksi dan *Real Estate*, pertumbuhan sektor ini masuk di zona hijau dengan capaian 6,19 persen (*yoy*).

Terakhir, tiga sektor dengan kontribusi masing-masing diatas 3 persen yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, dan Sektor Jasa Perusahaan tumbuh secara berturut-turut 24,67 persen (*yoy*), 5,99 persen (*yoy*), dan 16,56 persen (*yoy*). Kinerja pertumbuhan kumulatif yang baik dari Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan kabar gembira seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Di sisi lain, kinerja dari Sektor Informasi dan Komunikasi dipengaruhi oleh peningkatan adopsi penggunaan teknologi

informasi dan pembayaran upah tenaga kerja di tahun 2022.

### **Dampak Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2022**

Sejak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), beberapa kelompok pajak secara langsung mendapatkan berkah peningkatan penerimaan. Pertama, melesatnya penerimaan PPh Final dari PPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. PPS berhasil mengumpulkan penerimaan pajak hingga Rp61,01 triliun dengan pengungkapan nilai harta bersih mencapai Rp594,82 triliun. Kedua, penerimaan PPN atas PMSE yang membukukan realisasi mencapai Rp10,11 triliun pada tahun 2022. Penerimaan dari PMSE tersebut merupakan kontribusi dari total 134 PMSE yang terdaftar sampai dengan akhir tahun 2022. Ketiga, penerimaan PPN yang berasal dari penyesuaian tarif PPN yang semula 10 persen menjadi 11 persen. Penyesuaian tarif PPN menjadi 11 persen tersebut berlaku



sejak tanggal 1 April 2022. Dampak dari penyesuaian tarif PPN tersebut membuahakan penerimaan pajak sebesar Rp60,76 triliun.

Selain ketiga sumber penerimaan pajak yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat sumber penerimaan pajak yang lain yaitu penerapan pajak atas transaksi Kripto dan pajak atas *Fintech* dan *Peer to Peer (P2P) Lending* yang berlaku sejak 1 Mei 2022. Pajak atas transaksi Kripto jika merujuk pada PMK 68/2022 Pasal 19, dikenakan PPh Pasal 22 kepada Penjual aset Kripto, Penyelenggara PMSE, dan Penambang Aset Kripto (*miner*). Sedangkan subjek PPN Kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset Kripto adalah Pembeli aset Kripto dan Penjual aset Kripto. Selanjutnya, pajak atas *Fintech* dan *P2P Lending* dikenakan atas transaksi pinjaman *online* yang merupakan objek jasa kena pajak dan terutang PPh Pasal 23. Dalam PMK 69/2022 Pasal 3, disebutkan bahwa Pemberi Pinjaman (*Lender*) dalam negeri yang menerima penghasilan bunga atau imbal hasil berdasarkan prinsip syariah dikenakan PPh Pasal 23. Sementara itu, Pemberi Pinjaman atau *Lender* dari

luar negeri yang menerima penghasilan bunga atau imbal hasil dikenakan PPh Pasal 26.

Pajak atas transaksi Kripto dan pajak atas *Fintech* dan *P2P Lending* mencatatkan total penerimaan pajak masing-masing sebesar Rp246,45 miliar dan Rp210,04 miliar. Bila dijabarkan per jenis pajaknya, Pajak Kripto merupakan hasil dari penerimaan PPh Pasal 22 atas Transaksi Aset Kripto melalui Penyelenggara PMSE DN, serta penyetoran sendiri PPN DN atas Pemungutan oleh Non-Bendaharawan. Sedangkan Pajak *Fintech* atau pajak yang dikenakan pada bisnis layanan teknologi pembiayaan merupakan penerimaan dari PPh Pasal 23 atas Bunga Pinjaman yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), serta PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN).

## Dampak Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2022



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Neraca Perdagangan  
Nasional Bulan  
Desember 2022 ini  
Tercatat Surplus  
USD4,29 miliar atau  
USD54,89 miliar  
Sepanjang 2022



# Kepabeanaan dan Cukai

**N**eraca Perdagangan (NP) Indonesia pada bulan Desember 2022 masih menunjukkan kinerja yang memuaskan. Surplus mencapai USD4,29<sup>1</sup> miliar dan melanjutkan rentetan surplus sejak dua tahun lalu, pada bulan Juni 2020. Meskipun menurun dibanding bulan sebelumnya, surplus ini masih lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tingginya surplus NP disebabkan kinerja ekspor yang masih positif diikuti dengan penurunan impor.

Sepanjang 2022 total NP mencapai USD54,89 miliar. Kinerja tersebut sangat memuaskan, terjadi pertumbuhan baik pada ekspor maupun impor. Ekspor tahun 2022 mencapai USD292,40

1. Realisasi bulan Desember 2022 menggunakan data DJBC belum direkonsiliasikan dengan BPS

miliar atau tumbuh 26,25 persen (yoy). Impor tahun 2022 mencapai USD237,51 miliar atau tumbuh 21,06 persen (yoy).

Surplus terjadi pada neraca nonmigas dan defisit pada neraca migas. Kinerja positif neraca nonmigas, ditopang oleh ekspor komoditas SDA berupa batubara, bijih tembaga dan produk kelapa sawit. Selain itu dari sisi manufaktur berupa olahan logam dan kendaraan. Sedangkan dari sisi neraca migas, defisit masih berlanjut terutama dikontribusikan oleh impor bensin dan minyak bumi.

Ekspor Desember masih tumbuh dibandingkan tahun lalu maupun bulan sebelumnya. Ekspor bulan Desember 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 8,33

## Realisasi Penerimaan Kepabebean dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres 98	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian	Surplus/ Defisit
			2021	2022	2021	2022		
1	BEA MASUK	42,34	39,12	51,08	20,59%	30,56%	120,64%	8,74
2	CUKAI	220,00	195,52	226,88	10,89%	16,04%	103,13%	6,88
	Hasil Tembakau	209,91	188,81	218,62	10,91%	15,79%	104,15%	8,71
	Ethil Alkohol	0,13	0,11	0,13	-53,11%	12,37%	98,01%	0,00
	MMEA	6,86	6,50	8,07	12,82%	24,16%	117,60%	1,21
	Denda Adm. Cukai	-	0,07	0,04	28,91%	-40,58%	-	-
	Cukai Lainnya	-	0,02	0,02	88,87%	-6,35%	-	-
	Plastik & MBDK	3,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-3,10
3	BEA KELUAR	36,69	34,57	39,82	708,21%	15,18%	108,53%	3,13
	<b>TOTAL</b>	<b>299,03</b>	<b>269,21</b>	<b>317,78</b>	<b>26,37%</b>	<b>18,04%</b>	<b>106,27%</b>	<b>18,75</b>
	PPN Impor		191,49	270,71	36,33%	41,37%		
	PPn BM Impor		3,37	4,89	12,22%	45,11%		
	PPh Pasal 22 Impor		40,47	74,20	49,25%	83,33%		
	Total PDRI lainnya		235,33	349,79	37,96%	48,64%		
	<b>TOTAL DJBC + PERPAJAKAN</b>		<b>504,54</b>	<b>667,57</b>	<b>31,53%</b>	<b>32,31%</b>		

Angka dalam triliun rupiah  
Sumber: DJPB 5 September 2022

persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama pada sektor yang berasal dari industri pengolahan dan pertambangan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan bulan November 2022, ekspor juga masih meningkat tipis, 0,41 persen (*mtm*).

Pertumbuhan ekspor bulan November 2022 terjadi pada sektor migas dan nonmigas. Kinerja sektor nonmigas masih konsisten tumbuh, kali ini mencapai 6,83 persen (yoy). Pertumbuhan terbesar berasal dari peningkatan ekspor batubara dan bijih tembaga, yang masing-masing tumbuh 35,03 persen (yoy) dan 100,73 persen (yoy). Sedangkan ekspor dari sektor migas naik 38,24 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong naiknya ekspor gas alam yang seiring dengan kenaikan harga. Selain itu, minyak bakar dan minyak bumi juga mengalami kenaikan volume ekspor.

Berbeda dengan ekspor, kinerja impor mengalami penurunan pada bulan Desember. Impor turun 6,67 persen (yoy) baik dari sektor migas maupun nonmigas. Impor migas turun 3,88 persen (yoy). Pelemahan tersebut dipengaruhi oleh penurunan impor minyak bumi

dan gas alam maupun buatan. Selain itu, harga minyak dunia juga sudah mulai termoderasi. Sedangkan impor nonmigas turun 7,20 persen (yoy). Penurunan terjadi karena melemahnya importasi besi baja dan resin sintetis.

Peningkatan kinerja ekspor dan impor, turut memengaruhi realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terutama pada Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK). Hingga tanggal 31 Desember 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp317,78 triliun atau 106,27 persen dari Target. Penerimaan ini meningkat 18,04 persen (yoy) didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan. Komponen penerimaan cukai merupakan kontributor pertumbuhan terbesar, kemudian diikuti BM dan BK.

Realisasi atas penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) lainnya juga mengalami kinerja yang memuaskan. Penerimaan ini mencapai Rp349,79 triliun atau tumbuh 32,31 persen (yoy). Alhasil, total penerimaan negara yang telah dikumpulkan dari kepabeanan dan cukai serta PDRI lainnya mencapai

Rp667,57 triliun atau tumbuh sebesar 32,31 persen (yoy).

Dari sisi penerimaan, kinerja BM masih positif dan capaiannya 108,14 persen dari Target. Penerimaan ini mengalami pertumbuhan 30,56 persen (yoy) atau senilai Rp51,08 triliun. Kinerja memuaskan ini tidak lepas dari kondisi impor nasional yang secara akumulatif masih meningkat. Terutama dari importasi kendaraan, suku cadang, dan barang logam pra-pabrikasi yang meningkat cukup signifikan. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi indikasi sudah membaiknya aktivitas ekonomi, sektor industri dan investasi.

Penerimaan cukai merupakan kontributor terbesar penerimaan kepabeanan dan cukai. Penerimaan cukai mencapai Rp226,88 triliun atau 103,13 persen dari Target atau tumbuh 16,04 persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan Cukai didorong efektivitas kebijakan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Hal tersebut sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional (daya beli meningkat), relaksasi daerah tujuan wisata, dan penguatan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai

(BKC) ilegal. Penerimaan Cukai, terdiri atas Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA).

Kemudian untuk penerimaan cukai HT di tahun 2022 tumbuh 15,79 persen (yoy), mencapai Rp218,62 triliun. Hal ini berarti Target telah tercapai 104,15 persen. Kinerja ini didukung oleh efektivitas kebijakan peningkatan tarif HT tahun 2022. Pertumbuhan Cukai HT juga dipengaruhi limpahan penerimaan dari tahun 2021 sebagai efek PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Meskipun mengalami peningkatan penerimaan, namun produksi batang rokok mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan fungsi cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif cukai HT tahun 2022, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif cukai HT sebesar 12 persen, produksi sigaret di tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 3 persen.



Berdasarkan data pemesanan pita cukai, sepanjang 2022, pertumbuhan produksi sigaret turun sebesar 3,3 persen (*yoy*), dengan demikian kondisi ini masih sejalan dengan kebijakan untuk pembatasan konsumsi rokok.

Penerimaan cukai MMEA juga masih tumbuh *double digits*, seperti bulan-bulan sebelumnya. Kali ini pertumbuhannya mencapai 24,16 persen (*yoy*) atau senilai Rp8,07 triliun. Sehingga penerimaan cukai MMEA telah mencapai 117,60 persen dari Target. Faktor utama pendukung kinerja tersebut adalah produksi MMEA, terutama dalam negeri. Produksi MMEA dalam negeri memberikan kontribusi yang dominan, sekitar 98 persen. Peningkatan produksi ini juga merupakan dampak membaiknya ekonomi nasional, terutama dari Sektor Perhotelan dan Pariwisata.

Dari sisi penerimaan cukai EA juga masih mengalami pertumbuhan, mencapai Rp127,41 miliar atau 98,01 persen dari Target. Meskipun target EA tidak tercapai atau namun kinerjanya tumbuh

12,37 persen (*yoy*). Kinerja ini membawa penerimaan cukai EA mendekati pola normal. Sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau kisaran tahun 2017-2019, rata-rata penerimaan EA sebesar Rp11,4 miliar per bulan. Namun pada dasarnya sebagian besar EA tidak dipungut cukainya atau mendapatkan fasilitas karena digunakan untuk keperluan medis.

Penerimaan BK mencapai Rp39,82 triliun atau 108,53 persen dari Target. Kinerja tersebut masih mengalami peningkatan sebesar 15,18 persen (*yoy*). Peningkatan tersebut dikontribusi oleh ekspor produk kelapa sawit dan tembaga. Penerimaan komoditas CPO dan turunannya tumbuh 10,21 persen (*yoy*), terutama karena tarif bea keluar yang tinggi awal tahun, kemudian diikuti perubahan struktur tarif pada bulan Juni dan kebijakan *flush out*. Sedangkan dari komoditas tembaga, tumbuh 58,28 persen (*yoy*) didukung peningkatan volume ekspor tembaga.

Penerimaan  
Negara Bukan  
Pajak



Realisasi PNBPN Tahun  
2022 Menorehkan  
Rekor Tertinggi

# Penerimaan Negara Bukan Pajak

**K**ondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian dampak dari Perang Rusia dan Ukraina mendatangkan durian runtuh bagi perekonomian Indonesia. Barang komoditas khususnya batubara menjadi primadona buruan banyak negara. Di tengah dorongan negara-negara maju untuk segera meninggalkan batubara sebagai sumber energi ternyata pamor batubara Indonesia semakin berkilau mendatangkan cuan. Krisis

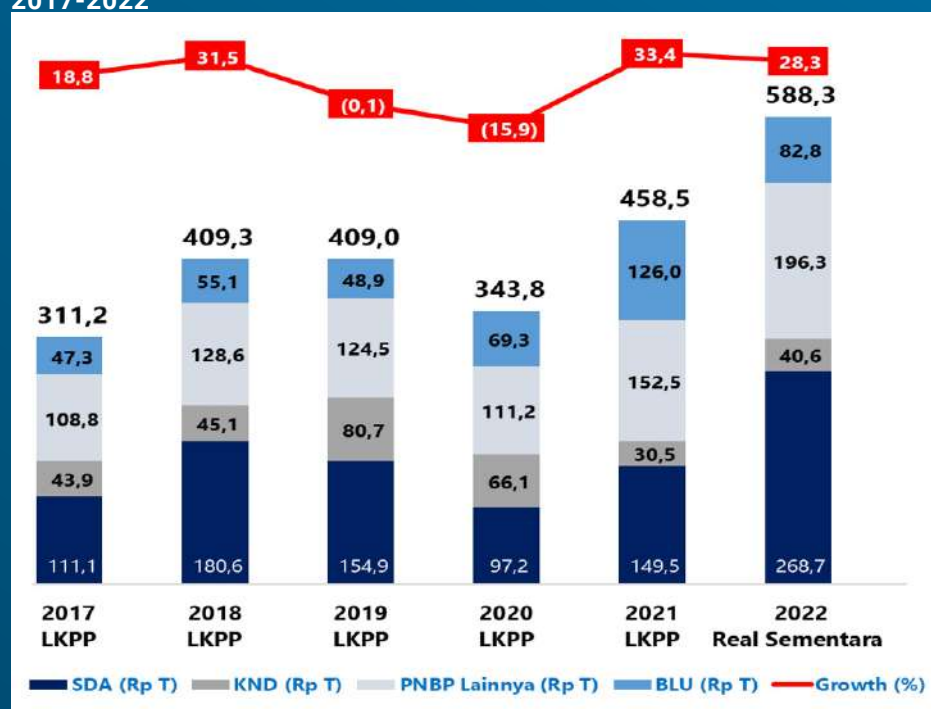
energi di belahan dunia barat telah mengerek kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) Indonesia. Kenaikan ini mendongkrak realisasi PNBPN tahun 2022 mencapai Rp588,34 triliun. Capaian ini melebihi 122,16 persen dari Target. Peningkatan PNBPN yang signifikan sebesar Rp129,85 triliun dari tahun 2021 tersebut mayoritas disumbang dari kenaikan PNBPN SDA sebesar 45,67 persen.

Perkembangan realisasi PNBPN selama 6 (enam) tahun terakhir

## Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

<b>PNBP</b> (Miliar Rupiah)	<b>APBN 2022</b> (Perpres 98/2022)	<b>Realisasi s.d.</b> <b>31 Des 2022</b>	<b>% APBN</b>	<b>% Growth</b> (YoY)
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>481.631,10</b>	<b>588.343,72</b>	<b>122,16</b>	<b>28,32</b>
<b>A Pendapatan SDA</b>	<b>226.518,50</b>	<b>268.672,71</b>	<b>118,61</b>	<b>79,73</b>
<b>1 Migas</b>	<b>139.098,41</b>	<b>148.542,49</b>	<b>106,79</b>	<b>53,74</b>
a Minyak Bumi	106.487,89	118.060,39	110,87	81,63
b Gas Bumi	32.610,52	30.482,11	93,47	(3,59)
<b>2 Nonmigas</b>	<b>87.420,09</b>	<b>120.130,21</b>	<b>137,42</b>	<b>127,21</b>
a Pendapatan Pertambangan Minerba	78.871,29	110.785,81	140,46	147,09
b Pendapatan Kehutanan	5.241,15	5.863,27	111,87	8,57
c Pendapatan Perikanan	1.686,56	1.192,95	70,73	68,45
d Pendapatan Panas Bumi	1.621,09	2.288,19	141,15	18,61
<b>B Pendapatan KND</b>	<b>37.089,85</b>	<b>40.597,09</b>	<b>109,46</b>	<b>33,12</b>
<b>C Pendapatan PNBP Lainnya</b>	<b>112.221,73</b>	<b>196.251,32</b>	<b>174,88</b>	<b>28,69</b>
<b>D Pendapatan BLU</b>	<b>105.801,01</b>	<b>82.822,60</b>	<b>78,28</b>	<b>(34,27)</b>

## Perkembangan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 2017-2022



terlihat fluktuatif. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak menurunnya capaian PNBP hingga Rp343,81 triliun. Seiring semakin meredanya pandemi, roda perekonomian pun menggeliat dan Pemerintah menggulirkan berbagai upaya untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional. Hasilnya, sinyal pemulihan mulai nampak dengan semakin membaiknya kinerja fiskal, khususnya pendapatan negara. PNBP sebagai salah satu komponen pendapatan negara, pada tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp458,49 triliun dan tumbuh 33,36 persen. Rasio PNBP terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 rasio PNBP terhadap PDB sebesar 2,29 persen, sedangkan pada tahun 2022 rasio tersebut mencapai 3,32 persen. Dukungan IT juga turut menyumbang perolehan PNBP yang optimal dengan diimplementasikannya Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), *Automatic Blocking System* (ABS), Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antara Kementerian/Lembaga (SIMBARA), dll.

Kinerja Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp148,54 triliun. Capaian ini 106,79 persen dari Target. Pendapatan SDA Migas tumbuh 53,74 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 39,86 persen. Rata-rata ICP bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar USD97,03 per barel atau naik 41,71 persen (yoy). ICP sepanjang tahun 2022 mengalami fluktuasi mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah sempat memecahkan rekor tertinggi di awal tahun 2022, namun jatuh menjelang akhir tahun 2022.

Adapun rata-rata *lifting* minyak bumi bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022 sebesar 607,41 ribu barel per hari atau turun 7,53 persen (yoy). Demikian pula, rata-rata *lifting* gas bumi bulan Januari 2022 sampai dengan November 2022 sebesar 951,07 ribu barel setara minyak per hari atau turun 4,86 persen (yoy). Kenaikan rata-rata ICP periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 mengkompensasi penurunan *lifting* minyak bumi

dan gas bumi sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN 2022. Dalam APBN Perpres 98 Tahun 2022 ditetapkan asumsi ICP sebesar USD100,00 per barel. Adapun asumsi lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 703 ribu barel per hari dan gas bumi sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp120,13 triliun atau 137,42 persen dari Target. Capaian ini tumbuh sebesar 127,21 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tumbuh 87,86 persen. Dalam tahun 2022, mulai bulan Januari 2022 terjadi peningkatan pendapatan SDA Nonmigas yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menyumbang 92,22 persen atas pendapatan SDA Nonmigas dibandingkan dengan sektor lainnya (Kehutanan, Perikanan, dan Panas Bumi).

Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tumbuh sebesar 147,09 persen. Kinerja Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba tersebut disebabkan meningkatnya Harga Batubara Acuan (HBA) rata-rata bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebesar USD276,6 per ton yang mengalami kenaikan 127,7 persen (yoy). Di samping itu, kenaikan realisasi Pendapatan SDA Nonmigas sektor Pertambangan Minerba juga ditopang dengan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2022 yang mengatur jenis & tarif PNB yang baru pada PNB yang berlaku di Kementerian ESDM.

Selanjutnya, kenaikan Pendapatan SDA Nonmigas sektor lainnya juga mengalami peningkatan. PNB dari sektor Kehutanan tumbuh 8,57 persen (yoy) yang disebabkan adanya kenaikan produksi kayu dan pembayaran piutang PNB Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Implementasi ABS sejak tahun 2022 pada sektor Kehutanan cukup efektif meningkatkan penerimaan

negara hingga Rp137,6 miliar. Adapun PNBP sektor Perikanan juga tumbuh 68,45 persen (yoy) yang utamanya berasal dari penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI) dan kenaikan penerbitan perizinan. Selanjutnya, PNBP sektor Panas Bumi tumbuh 18,61 persen (yoy) karena adanya peningkatan iuran tetap dan iuran produksi panas bumi, adanya pembayaran atas tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP, serta penurunan besaran pencadangan saldo reimbursement PPN (sebagai pengurang bagian Pemerintah).

Realisasi Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp40,60 triliun atau 109,46 persen dari Target. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 33,12 persen (yoy). Kenaikan kinerja Pendapatan KND utamanya berasal dari kenaikan setoran dividen BUMN Perbankan. Setoran dividen BUMN Perbankan (Himbara) hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp24,58 triliun atau tumbuh 80,9 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya hingga 31 Desember 2022 mencapai Rp196,25 triliun atau 174,88 persen dari Target, tumbuh sebesar 28,69 persen (yoy). Peningkatan realisasi PNBP Lainnya terutama disumbang dari Pendapatan Penjualan Hasil Tambang sebesar Rp69,66 triliun dan Pendapatan Minyak Mentah (DMO) yang mencapai Rp10,07 triliun. Selanjutnya, juga terdapat kenaikan pendapatan yang disumbang dari pendapatan layanan Kementerian/Lembaga dengan realisasi sebesar Rp116,53 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 1,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan layanan K/L ini terutama disumbang dari Layanan Administrasi Hukum (seperti pembuatan visa dan paspor), Pendapatan Layanan Pertanahan, dan Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing. Di samping menjalankan peran sebagai unsur penyumbang pendapatan negara, PNBP juga turut berperan dalam pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut

diwujudkan dengan pemberian relaksasi dan insentif kepada masyarakat melalui pengenaan tarif sampai dengan Rp0,- . Pada tahun 2022 telah diberikan relaksasi/insentif PNBP hingga Rp148,79 miliar antara lain pemberian keringanan pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT), perizinan berusaha pemanfaatan di laut, dan lain-lain.


Pendapatan BLU sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai Rp82,82 triliun atau 78,28 persen dari Target. Realisasi PNBP BLU mengalami kontraksi sebesar 34,27 persen (yoy). Penurunan ini utamanya disebabkan penurunan Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit dampak kebijakan pelarangan sementara ekspor CPO (berlaku bulan April sampai dengan Mei 2022 berdasarkan Permendag 22 Tahun 2022) dan adanya pengenaan tarif, pungutan dana perkebunan sebesar USD 0 atas ekspor CPO (berlaku

bulan Juli s.d November 2022). Namun demikian sejak pertengahan November 2022 harga referensi Kemendag untuk CPO telah melebihi dari USD800 per ton sehingga sejak saat itu tarif normal berlaku sesuai Permenkeu 154/2022 sehingga pendapatan BLU mulai bergerak naik.



Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Belanja  
Pemerintah  
Pusat



Realisasi Belanja  
Pemerintah Pusat  
(BPP) utamanya untuk  
Perlindungan Sosial  
dan Pemenuhan  
Kewajiban Pemerintah

# Belanja Pemerintah Pusat

**R**ealisasi Sementara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp2.274,52 triliun (98,82 persen dari Pagu) atau meningkat 13,69 persen (*yoy*). Peningkatan realisasi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, dan pembayaran kewajiban Pemerintah antara lain gaji dan tunjangan, manfaat pensiun, pembayaran subsidi, serta kompensasi BBM.

## **Belanja K/L**

Realisasi sementara Belanja K/L mencapai Rp1.079,30 triliun atau 114,12 persen dari Pagu. Realisasi belanja K/L tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan Covid-19 dan berbagai program pemulihan

ekonomi nasional (PC PEN) melalui tiga klaster: kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Tambahan belanja di bidang kesehatan utamanya untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan obat-obatan/ vaksin penanganan Covid-19. Tambahan belanja di bidang perlindungan masyarakat utamanya untuk menjaga daya beli dan meringankan beban pengeluaran masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT BBM, dan Bantuan Subsidi Upah serta untuk penanggulangan bencana alam di beberapa daerah. . Tambahan belanja di bidang penguatan pemulihan ekonomi utamanya berupa dukungan kepada dunia usaha dan

## Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2022

Belanja Pemerintah Pusat	Perpres 98/2022	Realisasi Sementara		
		s.d 31 Des 2022	% thd Perpres 98/2022	% Growth (yoy)
<b>Belanja K/L</b>	<b>945,75</b>	<b>1.079,30</b>	<b>114,12</b>	<b>(9,36)</b>
Belanja Pegawai	266,18	257,28	96,66	3,48
Belanja Barang	337,94	422,14	124,91	(20,18)
Belanja Modal	199,20	238,85	119,90	(0,33)
Bantuan Sosial	142,43	161,03	113,06	(7,27)
<b>Belanja Non-K/L</b>	<b>1.355,89</b>	<b>1.195,22</b>	<b>88,15</b>	<b>47,58</b>
a.l. Belanja Pegawai	160,34	144,76	90,28	4,06
Subsidi	283,66	252,81	89,13	4,43
<b>Total Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>2.301,64</b>	<b>2.274,52</b>	<b>98,82</b>	<b>13,69</b>

(Angka dalam Triliun Rupiah)

UMKM, pemberian insentif pajak, pelaksanaan program padat karya, serta dukungan program ketahanan pangan.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp257,28 triliun atau 96,66 persen dari Pagu. Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk Gaji ke-13 dan THR. Realisasi tersebut meningkat sebesar 3,48 persen (yoy). Hal ini didorong oleh adanya komponen Tunjangan Kinerja sebesar 50,00 persen pada pembayaran Gaji ke-13 dan THR sesuai PP No. 16/2022.

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp423,39 triliun atau 124,62 persen dari Pagu, mengalami penurunan sebesar 20,12 persen (yoy). Penurunan tersebut memberikan indikasi yang sangat baik karena Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian dampak pandemi Covid-19. Indikasi lain ditunjukkan melalui realisasi anggaran untuk penanganan kesehatan tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021. Selain itu, penurunan realisasi anggaran tersebut juga dipengaruhi oleh program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang tidak dilanjutkan di tahun 2022. Sementara itu, realisasi anggaran belanja barang dimanfaatkan untuk

: (1) berbagai program/kegiatan yang mendukung PC-PEN, antara lain Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Tunai untuk PKL Warung dan Nelayan (PKLWN), penanganan pasien Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, dan pemberian insentif tenaga kesehatan; dan (2) berbagai program/kegiatan yang bersifat reguler (di luar program/kegiatan PC-PEN), antara lain Bantuan Operasional Siswa (BOS), penugasan pada BLU yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemberian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kegiatan layanan operasional perkantoran, pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan operasi keamanan, serta kegiatan pelayanan publik lainnya. Realisasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat reguler tersebut diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2021 yang memberikan indikasi yang sangat baik, dimana kegiatan sektor-sektor sudah mulai berjalan setelah dampak pandemi Covid-19 dapat terkendali. Baik program/kegiatan PC-PEN maupun yang bersifat reguler dilaksanakan oleh beberapa K/L antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kemenkeu dan POLRI.

## Capaian Output Strategis s.d 31 Desember 2022



\*) Capaian output bersifat sementara



Selanjutnya, realisasi Belanja Modal tahun 2022 mencapai Rp238,85 triliun atau 119,91 persen dari Pagu. Realisasi belanja modal tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,33 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya relaksasi atas penyelesaian proyek infrastruktur tahun 2020 yang baru dibayarkan di awal tahun 2021. Apabila tidak memperhitungkan relaksasi tersebut, kinerja belanja modal tahun 2022 tetap meningkat sebesar 7,99 persen (yoy). Berdasarkan kinerja K/L, realisasi belanja modal mengalami peningkatan pada Kementerian Pertahanan sebesar 51,75 persen (yoy) yang digunakan untuk modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan), non Alutsista dan dukungan sarana prasarana bidang pertahanan. Peningkatan kinerja realisasi belanja modal oleh POLRI juga mengalami pertumbuhan sebesar 14,24 persen (yoy) yang digunakan untuk modernisasi Almatsus (Alat dan Material Khusus), dan dukungan sarana prasarana bidang keamanan. Realisasi belanja modal tahun 2022 berdasarkan akun utamanya berasal dari : (1) belanja modal peralatan dan mesin yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan/modernisasi peralatan pada POLRI dan

Kemhan; (2) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas (antara lain Jalan, Jembatan, Rel Kereta Api, Bendungan, dan Jaringan Irigasi) pada Kementerian PUPR dan Kemenhub; (3) belanja modal gedung dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas prajurit TNI dan POLRI, Bandara pada Kemenhub, Rusun dan Rusus pada Kementerian PUPR, Gedung Pendidikan Tinggi pada Kementerian Agama, dan pembangunan rumah sakit pada Kementerian Kesehatan; (4) belanja modal Tanah yang dimanfaatkan antara lain untuk pengadaan lahan proyek strategis nasional (PSN) dalam pembangunan proyek infrastruktur berupa jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, kereta api, pelabuhan, dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2022 mencapai Rp161,03 triliun atau 113,06 persen dari Pagu. Realisasi Bansos yang melampaui pagunya tersebut dipengaruhi oleh adanya tambahan alokasi Bansos pada Kementerian Sosial untuk meringankan beban pengeluaran dan menjaga daya beli masyarakat di tengah

## Capaian Output Strategis s.d 31 Desember 2022





tekanan kenaikan harga komoditas melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan BLT BBM serta pemberian bansos untuk lansia, disabilitas dan anak yatim piatu. Secara nominal, realisasi Bansos tahun 2022 tersebut terkontraksi 7,27 persen (*yoy*), hal ini dipengaruhi oleh semakin membaiknya perkembangan penyebaran pandemi Covid-19 sehingga kebutuhan anggaran bansos dalam rangka penanganan Covid-19 dan PEN lebih rendah dari tahun sebelumnya. Adapun capaian *output* strategis belanja Bansos tahun 2022 antara lain sebagai berikut: (1) penyaluran bantuan tunai bersyarat Program PKH kepada 10 juta keluarga; (2) penyaluran bantuan pangan Program Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga; (3) pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada 20,4 juta penerima; (4) penyaluran BLT BBM kepada 20,7 juta keluarga; (5) pembayaran iuran bagi peserta PBI Program JKN bagi 96,7 juta jiwa; (6) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar bagi 20,1 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 847,7 ribu mahasiswa;

(7) pemberian Bansos permakanaan bagi lansia dan disabilitas, serta ATENSI bagi yatim piatu secara total mencapai 400 ribu orang.

### **Belanja Non-K/L**


Realisasi Belanja Non-K/L sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp1.195,2 triliun atau 88,15 persen dari Pagu, tumbuh 47,58 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2021, yang digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, kompensasi BBM dan listrik, serta subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L tahun 2022 terealisasi sebesar Rp144,76 triliun atau 90,28 persen terhadap Pagu, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/Polri (termasuk pembayaran THR dan pensiun ke-13) serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara.

Sementara itu, realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp252,81 triliun atau 89,13 persen dari Pagu naik sebesar 4,43 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri dari: (a) Subsidi Energi sebesar Rp171,86 triliun, mencakup Subsidi BBM

dan LPG tabung 3 Kg serta Subsidi Listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar Rp80,95 triliun, mencakup Subsidi Pupuk, Subsidi PSO, Subsidi Bunga Kredit Program, dan Subsidi Pajak. Realisasi belanja Subsidi tahun 2022 diantaranya dimanfaatkan untuk pembayaran kurang bayar Subsidi BBM dan LPG pada tahun sebelumnya. Belanja Subsidi digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung UMKM melalui program PEN. Sampai dengan akhir 2022, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 16,48 juta KL, LPG tabung 3 Kg mencapai 7,33 juta MT, dan pelanggan listrik bersubsidi mencapai 38,97 juta pelanggan dengan volume konsumsi listrik bersubsidi mencapai 60,30 TWh. Selanjutnya, realisasi penyaluran Subsidi NonEnergi sampai dengan akhir 2022 meliputi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,40 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 7,59 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp364,34 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 225,99 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain tahun 2022 mencapai Rp404,25 triliun atau tumbuh 407,19 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi adanya percepatan pembayaran kompensasi BBM dan listrik sampai dengan triwulan III tahun 2022 dalam rangka menjaga ketersediaan energi yang terjangkau masyarakat, dengan realisasi mencapai Rp379,32 triliun. Realisasi Belanja Lain-Lain juga dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja mencapai Rp16,36 triliun, utamanya untuk biaya pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 4,98 juta peserta. Selain itu, realisasi Belanja Lain-Lain digunakan pula untuk Cadangan Beras Pemerintah, yaitu untuk pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan Bencana Alam sebanyak 432,24 ribu ton dengan jumlah realisasi mencapai Rp2,45 triliun, serta untuk pembayaran tagihan program Bantuan Beras PPKM 2021 sebesar Rp3,09 triliun atas penyaluran 288,00 ribu ton beras kepada sekitar 20 juta KPM tahun 2021.

Halaman Ini Dikосongkan



Transfer ke  
Daerah dan  
Dana Desa

Transfer ke Daerah  
dan Dana Desa (TKD)  
sampai dengan 31  
Desember 2022,  
telah disalurkan  
sebesar Rp816,24  
triliun

# Transfer ke Daerah dan Dana Desa

**T**ransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sampai dengan 31 Desember 2022, telah disalurkan sebesar **Rp816,24 triliun** atau 101,42 persen dari Pagu, yang meliputi Transfer ke Daerah sebesar Rp748,33 triliun atau 101,57 persen dari Pagu dan Dana Desa Rp67,91 triliun atau 99,86 persen dari Pagu. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 3,89 persen (yoy).

## A. DANA PERIMBANGAN

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana tercantum dalam Perpres 98 Tahun 2022 hingga 31 Desember 2022 telah dilaksanakan sebesar Rp105,1 triliun atau mencapai 99,8 persen. Namun demikian, terdapat proses penghentian salur untuk DBH jenis CHT dan DBH Kehutanan sebesar Rp182,6 miliar sehingga total penyaluran mencapai 100 persen. Adanya kenaikan

outlook realisasi penerimaan, mengakibatkan tambahan pagu alokasi DBH Tahun 2022 melalui PMK Nomor 215/PMK.07/2022 sebesar Rp12 triliun dan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 sebesar Rp13,4 triliun. Selain itu, terdapat penyelesaian Kurang Bayar (KB) DBH Tahun 2021 yang pada tahun 2022 disalurkan sebesar Rp37,9 triliun atau mencapai 90,5 persen dari alokasi yang ditetapkan dalam PMK Nomor 127/PMK.07/2022. Penyaluran tambahan alokasi DBH tersebut sudah dilaksanakan pula pada 31 Desember 2022, sehingga total DBH yang sudah disalurkan mencapai Rp168,41 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 43,75 persen (*yoy*). Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp59,66 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang sebesar Rp70,85 triliun. Sebagian DBH, penggunaannya telah ditentukan (*earmarked*), yaitu DBH CHT dan DBH Kehutanan khususnya Dana Reboisasi (DBH DR). Capaian penyaluran DBH CHT sebesar Rp4,4 triliun atau 97,6 persen yang penggunaannya difokuskan untuk bidang kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani tembakau/buruh tani

tembakau dan/atau buruh rokok, bidang kesehatan dalam rangka mengendalikan dampak konsumsi barang kena cukai dan bidang penegakan hukum dalam rangka meminimalisir peredaran barang kena cukai ilegal. Sedangkan capaian penyaluran DBH SDA Kehutanan sebesar DR Rp1,8 triliun atau 96,0 persen yang penggunaannya difokuskan untuk rehabilitasi di luar kawasan, pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan dalam kawasan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi KPH, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, penanaman daerah aliran sungai kritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta kegiatan strategis lainnya.

Per 31 Desember 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) telah disalurkan sebesar Rp378,00 triliun atau 100,00 persen dari Pagu. Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,06 persen (*yoy*) yang disebabkan kecepatan dan

kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Hingga 31 Desember 2022, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disalurkan sebesar Rp54,78 triliun atau 90,00 persen dari Pagu. Angka realisasi penyaluran TA 2022 (90,00 persen) sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan TA 2021 (89.66 persen) karena ada percepatan dan pemulihan ekonomi melalui DAK Fisik secara padat karya. Selain itu kenaikan tersebut dikarenakan adanya surat Dirjen Perimbangan Keuangan perihal percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik TA 2022 serta percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2022 yang membuat dampak adanya peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Faktor lain yaitu adanya perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur DAK Fisik, yang seharusnya tanggal 21 Juli 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 khusus untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB sesuai dengan KMK nomor 22/KM.7/2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen

Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan KB TA 2022. Selanjutnya hal yang mempengaruhi peningkatan penyaluran DAK Fisik yaitu adanya pelaksanaan sosialisasi terkait reuiu APIP dalam penyaluran DAK Fisik pada tahun 2021, sehingga APIP lebih memahami tupoksi dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2022.

Realisasi penyaluran DAK Nonfisik per 31 Desember 2022 telah mencapai Rp118,38 triliun atau 91,97 persen dari Pagu. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 7,20 persen (yoy) yang dikarenakan adanya perhitungan sisa dana BOS 2020 dan 2021 pada penyaluran tahap 2 dan tahap 3 untuk memaksimalkan sisa dana BOS TA 2020 dan 2021 yang terdapat di rekening sekolah. Selain itu, terdapat Penurunan realisasi TPG dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh adanya optimalisasi sisa dana di RKUD sesuai rekomendasi Kemendikbudristek. Selanjutnya Capaian/Output DAK Nonfisik tahun 2022 antara lain berupa penyaluran Dana BOS yang dimanfaatkan oleh 43.694.412 siswa dan

## REALISASI TKD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022

Uraian	2021		2022		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>795.479,48*</b>	<b>785.707,59</b>	<b>804.780,47</b>	<b>816.235,23</b>	<b>101,42</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>723.479,48</b>	<b>713.853,88</b>	<b>736.780,47</b>	<b>748.329,09</b>	<b>101,57</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>688.676,56</b>	<b>679.586,68</b>	<b>708.024,21</b>	<b>719.578,16</b>	<b>101,63</b>
1. Dana Transfer Umum	492.253,01	491.948,38	515.430,97	516.171,11	105,40
a. Dana Bagi Hasil	101.961,02	117.156,99	140.430,97	168.171,11	119,99
b. Dana Alokasi Umum	390.291,99	377.791,39	378.000,00	378.000,00	100,00
2. Dana Transfer Khusus	196.423,55	184.638,30	189.593,84	173.165,05	91,33
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	65.248,20	57.069,67	60.674,00	54.783,95	90,00
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.175,35	127.568,62	128.719,84	118.381,09	91,97
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.464,28</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.993,67</b>	<b>99,91</b>
<b>C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>21.302,92</b>	<b>20.802,92</b>	<b>21.756,26</b>	<b>21.756,26</b>	<b>100,00</b>
1. Dana Otsus	19.982,92	19.482,92	20.436,26	20.436,26	100,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	7.805,89	7.555,89	8.505,00	8.505,00	100,00
b. Provinsi Aceh	7.805,89	7.555,89	7.560,00	7.560,00	100,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.371,26	4.371,26	4.371,26	4.371,26	100,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00
<b>Dana Desa</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.906,14</b>	<b>99,88</b>

Tanggal: 1 – 31 Desember 2022  
dalam miliar rupiah



penyaluran Dana TPG ASN Daerah untuk 1.057.614 Guru ASN Daerah.

### **DANA INSENTIF DAERAH (DID)**

Sampai dengan 31 Desember 2022, DID atas kinerja tahun sebelumnya telah disalurkan sebanyak Rp3,99 triliun atau 99,84 persen dari Pagu sebesar Rp4,00 triliun yang dialokasikan untuk 383 Pemda. Selain itu, berdasarkan APBN Perpres 98/2022, terdapat Pagu DID atas kinerja tahun berjalan sebesar Rp3,00 triliun, dimana Rp1,50 triliun di antaranya telah disalurkan kepada 125 pemda penerima alokasi sebagaimana ditetapkan melalui PMK Nomor 140 Tahun 2022 dan Rp1,50 triliun sisanya telah disalurkan kepada 107 Pemda provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 170 tahun 2022. Sehingga secara total, DID tahun 2022 telah berhasil disalurkan sebesar Rp6,99 triliun atau 99,91 persen dari Pagu. Persentase realisasi secara total tersebut mengalami kenaikan dibanding penyaluran pada periode yang sama di tahun 2021 yang sebesar 99,74 persen dari pagu alokasi DID yang ditetapkan

dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020. Perbaikan capaian tersebut disebabkan antara lain semakin baiknya koordinasi antara pusat dan daerah serta meningkatnya pemahaman admin pemda dalam menyusun laporan syarat salur DID, sehingga proses verifikasi dapat lebih optimal.

### **DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA**

Dana Otonomi Khusus telah disalurkan sebesar Rp20,44 triliun pada 31 Desember 2022 atau 100 persen dari Pagu. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan tata kelola baru Dana Otonomi Khusus melalui PMK Nomor 76/PMK.07/2022 dimana waktu penyaluran Dana Otsus lebih cepat dibanding sebelumnya dimana waktu paling akhir penyaluran Dana Otsus di Bulan November serta penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke masing-masing RKUD provinsi, kabupaten dan kota di Wilayah Papua. Diperkirakan realisasi untuk bidang Pendidikan sebesar 1,35 Triliun, serta realisasi bidang Kesehatan

sebesar 900 Miliar. Selanjutnya, untuk Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta juga telah disalurkan seluruhnya atau sebesar Rp1,32 triliun. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya. Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai urusan keistimewaan Jogja antara lain untuk kebudayaan, pertanian, tata ruang dan kelembagaan.

## **B. DANA DESA**

Realisasi Dana Desa sampai dengan akhir Desember 2022 adalah telah mencapai Rp67,91 triliun atau 99,86 persen dari Pagu. Persentase realisasi tersebut mengalami kenaikan dibanding penyaluran pada periode yang sama di tahun 2021 yaitu sebesar 99,80 persen dari Pagu alokasi yang ditetapkan dalam Perpres No. 113 Tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran Pemda dalam pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dan berkurangnya jumlah desa yang tidak mengajukan penyaluran Dana Desa, dari 22 Desa di tahun 2021 menjadi 13 desa di tahun 2022.

Selanjutnya, dari segi penggunaan, Dana Desa penggunaannya diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa

pemberian BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, dukungan penanggulangan Covid-19 di desa dan program-program prioritas lainnya. Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa di tahun 2022 telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp26,94 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 7,48 juta KPM di 74.935 desa. Realisasi BLT Desa tersebut tersebut meningkat signifikan Rp6,7 triliun atau sebesar 33,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan penerima, jumlah penerima BLT Desa juga meningkat signifikan sebesar 33 persen dari 5,62 juta KPM pada tahun 2021 menjadi 7,48 juta KPM di tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya perwujudan kebijakan berupa penyaluran BLT Desa dari per bulan menjadi per triwulan dan adanya perluasan kriteria penerima BLT Desa serta KPM BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Adapun realisasi prioritas penggunaan Dana Desa lainnya, berdasarkan data OMSPAN, realisasi penggunaan Dana Desa untuk penanganan covid-19 sebesar Rp5,43 triliun. Sementara itu, berdasarkan

data Kementerian Desa PDTT, realisasi penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp12,19 triliun dan infrastruktur sebesar Rp10,01 triliun.

Dari segi output penggunaan Dana Desa, berdasarkan data Kementerian Desa PDTT hasil olahan, Dana Desa telah menghasilkan output berupa sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu terbangunnya lebih dari 8,1 ribu kilometer jalan desa; 14,3 ribu meter jembatan; 53 unit pasar desa; 82 unit BUMDesa; 36.384 unit sarana olah raga; 167.121 unit sambungan air bersih; 490 unit MCK; 54 unit Polindes; 51 unit tambatan perahu; 246 unit PAUD; 52.392 unit sumur; 257.865 unit drainase; 420.934 unit irigasi; 368 unit Posyandu; dan 59 unit embung.

Seiring dengan  
Pemulihan Ekonomi  
Domestik yang Masih  
Kuat dan  
Peningkatan Signifikan  
dari Sisi Pendapatan  
Negara, Realisasi  
Pembiayaan utang  
Tahun 2022  
Lebih Rendah dari  
Target Awal

# Pembiayaan Utang

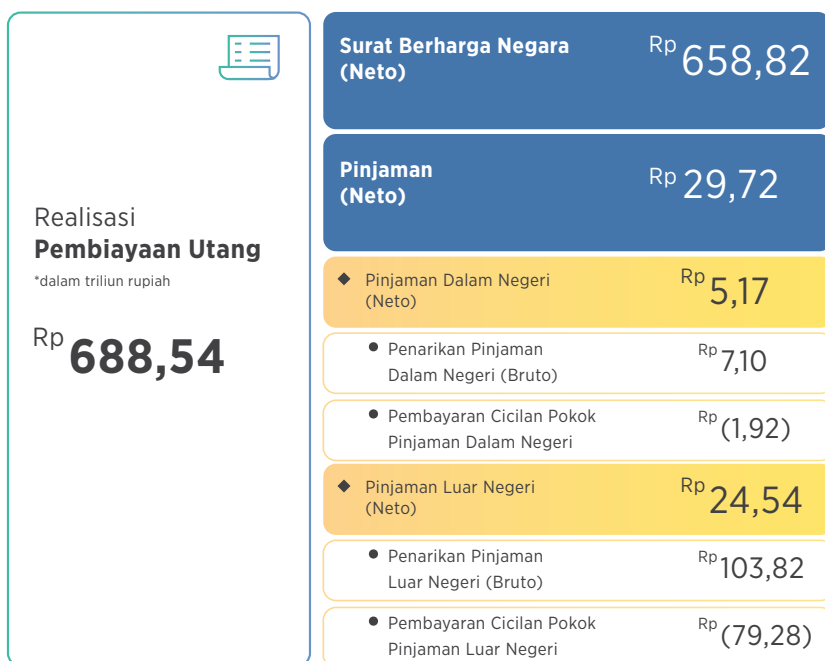
**K**inerja APBN hingga akhir Desember 2022 APBN mengalami defisit sebesar Rp464,3 triliun atau 2,38 persen terhadap PDB. Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan signifikan dari sisi pendapatan negara akibat implementasi UU HPP serta peningkatan harga komoditas, realisasi defisit tahun 2022 jauh lebih rendah dari Pagu, bahkan berada di bawah 3 persen

PDB sebagaimana disiplin fiskal pra-pandemi. Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang hingga Desember 2022 pun mengalami penurunan, yaitu mencapai Rp688,54 triliun atau 73,00 persen dari Target. Capaian ini jauh lebih rendah, atau turun 20,9 persen dibandingkan tahun 2021. Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan Covid-19 dan program PEN, serta dalam menghadapi

# Pembiayaan Utang

per 31 Desember 2022

**f** Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih kuat dan peningkatan signifikan dari sisi pendapatan negara, realisasi pembiayaan utang tahun 2022 lebih rendah dari target awal.



dampak dan risiko global lainnya.

Selama tahun 2022, pemerintah telah melakukan penyesuaian target pembiayaan utang, optimalisasi penerbitan SBN Ritel, dan fleksibilitas pinjaman program sebagai strategi utama pembiayaan utang dalam mengantisipasi volatilitas pasar keuangan.

Pada minggu pertama bulan Desember 2022, atau 6 Desember 2022, pemerintah menyelesaikan penerbitan SBN melalui lelang SUN reguler. Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan portofolio utang, pemerintah juga melakukan pembelian kembali SUN dengan cara *Bilateral Buyback* pada tanggal 21 Desember 2022. Terakhir, pemerintah melakukan penerbitan SKB III dengan cara *Private Placement* kepada BI pada tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp128,58 triliun.

Kinerja pembiayaan utang hingga Desember 2022 pun mencatatkan hasil yang baik. Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp658,82 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp29,72 triliun.

Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,10 triliun, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,92 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp103,82 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp79,28 triliun.

Sampai dengan akhir Desember 2022, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57 persen.

Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang jika dibandingkan dengan bulan November 2022, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu (Desember 2021), rasio utang terhadap PDB menurun dari sebelumnya 40,74 persen menjadi 39,57 persen. Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih

## Komposisi Utang

**\*Data sementara per 30 Desember 2022**

**f** Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal

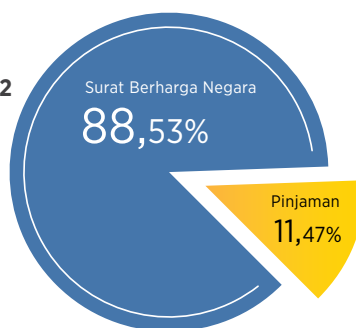
### Posisi Utang

**\*Data sementara per 30 Desember 2022**

Rp **7.733,99**

\*dalam triliun rupiah

**DEBT** Debt to GDP : **39,57%**



#### Surat Berharga Negara

Rp **6.846,89**



\*dalam triliun rupiah

● <b>Domestik</b>	Rp 5.452,36
Surat Utang Negara	Rp 4.441,12
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.011,24
● <b>Valas</b>	Rp 1.394,53
Surat Utang Negara	Rp 1.064,37
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 330,16

#### Pinjaman

Rp **887,10**



\*dalam triliun rupiah

● <b>Pinjaman DN*</b>	Rp 19,67
● <b>Pinjaman LN*</b>	Rp 867,43
Bilateral	Rp 282,75
Multilateral	Rp 529,99
Comercial Banks	Rp 54,70
Suppliers	Rp -



dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.

Berdasarkan jenisnya, utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang mencapai 88,53 persen dari seluruh komposisi utang akhir Desember 2022. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (Rupiah), yaitu 70,75 persen. Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang

Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Sementara itu, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh Perbankan dan diikuti BI, sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun sejak tahun 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir tahun 2021 tercatat 19,05 persen, dan per akhir Desember 2022 mencapai 14,36 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, pemerintah akan terus mewaspadaai berbagai risiko yang berpotensi meningkatkan *cost of borrowing* seperti pengetatan likuiditas global dan dinamika kebijakan moneter negara maju.

